PEMERINTAH ACEH

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI ACEH

MATRIKS ACTION PLAN REFORMASI IKLIM INVESTASI ACEH

2027–2030

Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif,
Inklusif, Berkelanjutan,
dan Berdaya Saing Global



INVESTASI BERKUALITAS

PERTUMBUHAN EKONOMI

EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN

TATA KELOLA YANG BAIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan buku ***Matriks Action Plan Reformasi Iklim Investasi Aceh 2027–2030*** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan salah satu luaran utama dari pelaksanaan **Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026** yang disusun sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan daya saing investasi, percepatan transformasi ekonomi daerah, serta penguatan tata kelola investasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan berdasarkan **Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (ToR) Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026** yang disusun oleh **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh**. Berpedoman pada ruang lingkup, tujuan, dan keluaran yang telah ditetapkan dalam KAK tersebut, Tim Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Strategi Daerah Indonesia (LEPADSI) melaksanakan keseluruhan proses kajian secara komprehensif melalui **desk research**, **studi literatur**, **survei persepsi pelaku usaha dan pemangku kepentingan**, serta **Focus Group Discussion (FGD)** yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, asosiasi bisnis, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berbasis data empiris, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata para pelaku pembangunan ekonomi di Aceh.

Sebagai hasil dari keseluruhan proses kajian tersebut, disusun tiga dokumen yang saling melengkapi sebagai satu kesatuan kebijakan. Dokumen pertama adalah ***Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026***, yang menyajikan hasil analisis menyeluruh mengenai kondisi eksisting, tantangan, peluang, persepsi investor, indeks iklim investasi, serta rekomendasi strategis bagi peningkatan daya saing investasi Aceh. Dokumen kedua adalah ***Executive Public Policy (EPP): Transformasi Iklim Investasi Aceh—Dari Potensi Menuju Daya Saing Global***, yang merangkum temuan-temuan utama dan rekomendasi kebijakan dalam format yang lebih ringkas sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Adapun dokumen ketiga, yaitu ***Matriks Action Plan Reformasi Iklim Investasi Aceh 2027–2030***, disusun sebagai panduan implementasi yang menerjemahkan rekomendasi kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional yang terukur, lengkap dengan penanggung jawab, target waktu, indikator kinerja, keluaran, hasil yang diharapkan, serta strategi mitigasi risiko.

Kehadiran buku ini dilandasi oleh pemahaman bahwa rekomendasi kebijakan akan memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan rencana

implementasi yang jelas, sistematis, dan dapat dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, Action Plan ini dirancang sebagai jembatan antara hasil kajian akademik dengan pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga setiap agenda reformasi dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan investasi di Provinsi Aceh.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh** atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kajian ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, asosiasi profesi, lembaga vertikal, serta seluruh responden survei dan peserta Focus Group Discussion yang telah memberikan data, informasi, masukan, serta berbagai perspektif yang sangat berharga bagi penyempurnaan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa dinamika investasi dan pembangunan ekonomi akan terus berkembang seiring perubahan lingkungan strategis di tingkat regional, nasional, maupun global. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan tidak dipandang sebagai dokumen yang bersifat statis, melainkan sebagai **living document** yang dapat diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, perubahan kebijakan, serta tantangan investasi pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap buku ***Matriks Action Plan Reformasi Iklim Investasi Aceh 2027–2030*** dapat menjadi acuan implementasi bagi Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan reformasi iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, transparan, hijau, halal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan investasi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh.

Banda Aceh 20 Juli

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

1 Pendahuluan **1**

2 Kerangka Implementasi **2**

3. Matriks Action Plan Reformasi 4

3.1 Prioritas I: Penguatan Regulasi Investasi 5

A. Narasi Pengantar 5

B. Matriks Action Plan 5

C. Elaborasi Program Prioritas 6

D. Critical Succees Factor 7

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 8

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 9

3.2 Prioritas II Reformasi Pelayanan Investasi 10

A. Narasi Pengantar 10

B. Matriks Action Plan 10

C. Elaborasi Program Prioritas 11

D. Critical Success Factors 13

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 13

3.3. Prioritas III: Modernisasi Promosi Investasi 14

A. Narasi Pengantar 14

B. Matriks Action Plan 15

C. Elaborasi Program Prioritas 16

D. Critical Success Factors 17

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 18

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 18

3.4 Prioritas IV: Pengembangan Infrastruktur Strategis 19

A. Narasi Pengantar 19

B. Matriks Action Plan 20

C. Elaborasi Program Prioritas 21
D. Critical Success Factors 22
E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 22
F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 23
G. Peta Infrastruktur Pendukung Kawasan Investasi Prioritas 23
3.5 Prioritas V: Penguatan SDM Investasi 27
A. Narasi Pengantar 27
B. Matriks Action Plan 27
C. Elaborasi Program Prioritas 28
D. Critical Success Factors 29
E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 30
F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 30
G. Roadmap Pengembangan *Investment Human Capital* 2027–2031 31
3.6 Prioritas VI: Percepatan Hilirisasi Industri 31
A. Narasi Pengantar 31
B. Matriks Action Plan 32
C. Fokus Hilirisasi Komoditas Unggulan 33
D. Elaborasi Program Prioritas 34
E. Critical Success Factors 36
F. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 36
G. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 37
H. Roadmap Hilirisasi Industri Aceh 2027–2030 38
3.7 Prioritas VII: Pengembangan *Green Investment* 39
A. Matriks Action Plan 32
B. Fokus Pengembangan *Green Investment* 41
C. Elaborasi Program Prioritas 41
D. Critical Success Factors 44
E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 44
F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 45
G. Roadmap Hilirisasi Industri Aceh 2027–2030 38
3.8 Prioritas VIII: Penguatan Ekonomi Syariah 47
A. Matriks Action Plan 47

B. Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah 49
C. Elaborasi Program Prioritas 49
D. Critical Success Factors 52
E. Quick Wins Tahun Pertama (2027) 53
F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027) 54
G. Roadmap Penguatan Ekonomi Syariah 2027–2030 54
H. Kerangka Integrasi Ekosistem Investasi Halal 55
4. **Matriks Integrasi Roadmap dan *Action Plan*** ***56***
A. Matriks Integrasi Roadmap 2027–2030 56
B. Matriks Aktivitas Tahunan Terintegrasi 58
C. Matriks Keterkaitan Antarprioritas 61
D. Matriks Target Utama 2027–2030 62
E. Mekanisme Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 63
F. Prinsip Implementasi Roadmap 63
G. Adaptif terhadap Perubahan 64
5. **Dashboard Monitoring dan Evaluasi** **64**
A. Kerangka Monitoring dan Evaluasi 65
B. Tujuan dan Fungsi Dashboard 65
C. Arsitektur Dashboard Monitoring dan Evaluasi 66
D. Dashboard Indikator Makro Investasi Aceh 66
E. Dashboard Delapan Prioritas Reformasi 69
F. Matriks Target Tahunan 2027–2030 70
G. Metadata Indikator Kinerja 71
H. Sistem Status Kinerja 73
I. Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi 74
J. Mekanisme Pengumpulan dan Validasi Data 75
K. Sistem Peringatan Dini 76
L. Matriks Tindak Lanjut Hasil Monitoring 76
M. Desain *Executive Investment Dashboard* *77*
N. Contoh Tampilan Ringkas Executive Dashboard 78
O. Tata Kelola Dashboard 78
P. Prinsip Pengembangan Dashboard 79

Q. Kesimpulan Dashboard Monitoring dan Evaluasi 79
6. Penutup dan Penguatan Kerangka Implementasi..... 80
A. Penegasan Akhir 80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Action Plan Penguatan Regulasi Investasi 2025 5
Tabel 3.2 Quick Wins Penguatan Regulasi Investasi Tahun 2027 8
Tabel 3.3 Expected Early Results Reformasi Regulasi Tahun 2027 9
Tabel 3.4 Matriks Action Plan Reformasi Pelayanan Investasi 10
Tabel 3.5 Quick Win Reformasi Pelayanan Investasi Tahun 2027 13
Tabel 3.6 Matriks Action Plan Modernisasi Promosi Investasi 15
Tabel 3.7 Quick Wins Modernisasi Promosi Investasi Tahun 2027 18
Tabel 3.8 Expected Early Results Modernisasi Promosi Tahun 2027 19
Tabel 3.9 Matriks 6.4 Action Plan Pengembangan Infrastruktur Strategis 20
Tabel 3.10 Quick Wins Pengembangan Infrastruktur Strategis Tahun 2027 22
Tabel 3.11 Expected Early Results Pengembangan Infrastruktur Strategis Tahun 2027 ... 23
Tabel 3.12 Kawasan Investasi Prioritas dan Infrastruktur Pendukung 24
Tabel 3.13 Prioritas Infrastruktur Tahun 2027 25
Tabel 3.14 Matriks 6.10 Action Plan Penguatan SDM Investasi 27
Tabel 3.15 Quick Wins Penguatan SDM Investasi Tahun 30
Tabel 3.16 Expected Early Results Penguatan SDM Investasi Tahun 2027 31
Tabel 3.17 Matriks 6.13 Action Plan Percepatan Hilirisasi Industri 32
Tabel 3.18 Arah Hilirisasi Komoditas Unggulan Aceh 34
Tabel 3.19 Quick Wins Percepatan Hilirisasi Industri Tahun 2027 36
Tabel 3.20 Expected Early Results Percepatan Hilirisasi Industri Tahun 2027 37
Tabel 3.21 Tahapan Percepatan Hilirisasi Industri 38
Tabel 3.22 Arah Pengembangan Klaster Hilirisasi 38
Tabel 3.23 Matriks 6.19 Action Plan Pengembangan *Green Investment* *39*
Tabel 3.24 Pilar Pengembangan Investasi Hijau Aceh 41
Tabel 3.25 Quick Wins Pengembangan *Green Investment* Tahun 2027 44
Tabel 3.26 Expected Early Results Pengembangan *Green Investment* Tahun 2027 45
Tabel 3.27 Tahapan Pengembangan Investasi Hijau 45
Tabel 3.28 Integrasi ESG dalam Siklus Investasi Aceh 46
Tabel 3.29 Matriks 6.25 Action Plan Penguatan Ekonomi Syariah 47
Tabel 3.30 Pilar Penguatan Ekonomi Syariah Aceh 48
Tabel 3.31 Quick Wins Penguatan Ekonomi Syariah Tahun 2027 53

Tabel 3.32 Expected Early Results Penguatan Ekonomi Syariah Tahun 2027 54
Tabel 3.33 Tahapan Pengembangan Ekosistem Investasi Halal..... 54
Tabel 3.34 Integrasi Ekosistem Investasi Halal Aceh..... 55
Tabel 4.1 Matriks Integrasi Prioritas Reformasi dan Tahapan Implementasi 56
Tabel 4.2 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2027 58
Tabel 4.3 Matriks Aktivitas Tahunan Terintegrasi 2028 59
Tabel 4.4 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2029 60
Tabel 4.5 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2030 61
Tabel 4.6 Matriks Keterkaitan Fungsional Antarprioritas 61
Tabel 4.7 Target Kinerja Terintegrasi..... 62
Tabel 5.1 Arsitektur Dashboard Investasi Aceh 62
Tabel 5.2 Matriks Dashboard Indikator Makro Investasi Aceh..... 67
Tabel 5.3 Matriks Indikator Monitoring Prioritas Reformasi 69
Tabel 5.4 Matriks Target Tahunan Dashboard Strategis..... 70
Tabel 5.5 Matriks Format Metadata Indikator 71
Tabel 5.6 Metadata Kepatuhan SLA Pelayanan Investasi..... 72
Tabel 5.7 Metadata Jumlah Proyek IPRO..... 72
Tabel 5.8 Metadata Proporsi Investasi Memenuhi ESG 73
Tabel 5.9 Klasifikasi Status Kinerja 73
Tabel 5.10 Matriks Siklus Monitoring dan Evaluasi 74
Tabel 5. 11 Proses Validasi Data..... 75
Tabel 5.12 Matriks Indikator Peringatan Dini 76
Tabel 5.13 Rencana Tindakan Korektif..... 76
Tabel 5.14 Ringkasan Indikator untuk Pimpinan Daerah..... 78
Tabel 5.15 Matriks Pembagian Peran Pengelolaan Dashboard 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Implementasi 2
Gambar 2 Peta Prioritas Infrastruktur Pendukung Investasi Aceh 25

MATRIKS ACTION PLAN REFORMASI IKLIM INVESTASI ACEH 2027–2030

1. Pendahuluan

Roadmap Transformasi Iklim Investasi Aceh Tahun 2027–2030+ yang telah disusun pada bab sebelumnya memberikan arah strategis reformasi investasi berdasarkan tahapan implementasi kelembagaan, akselerasi investasi, transformasi industri, hingga peningkatan daya saing global. Namun demikian, agar roadmap tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh Pemerintah Aceh, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk Action Plan Reformasi.

Action Plan ini berfungsi sebagai jembatan antara rekomendasi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Berbeda dengan rekomendasi yang menjelaskan arah kebijakan, Action Plan menjelaskan secara rinci tindakan yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, indikator keberhasilan, serta risiko implementasinya.

Dengan demikian, Action Plan ini diharapkan menjadi pedoman praktis bagi Pemerintah Aceh, DPR Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan reformasi iklim investasi secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada hasil.

2 Kerangka Implementasi

Gambar ini menggambarkan alur perubahan kebijakan yang sistematis, mulai dari identifikasi temuan hingga terciptanya dampak investasi yang nyata. Setiap tahapan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu rangkaian logis yang menghubungkan hasil kajian dengan implementasi program pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, rekomendasi kebijakan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan menjadi langkah kerja yang terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil.



Gambar 1. Kerangka Implementasi

Secara visual, gambar menampilkan delapan tahapan yang tersusun vertikal dan dihubungkan oleh panah ke bawah. Susunan tersebut menegaskan bahwa reformasi iklim investasi harus dilaksanakan secara berurutan, konsisten, dan saling terkait.

Tahap pertama adalah **Temuan**, yaitu hasil identifikasi atas kondisi aktual, hambatan, potensi, dan kebutuhan perbaikan iklim investasi. Temuan menjadi dasar empiris agar kebijakan tidak disusun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data, survei, diskusi pemangku kepentingan, serta analisis kondisi daerah.

Temuan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi **Prioritas Reformasi**. Pada tahap ini, berbagai persoalan dipilah berdasarkan tingkat urgensi, besarnya dampak, dan kemampuan pemerintah untuk menanganinya. Dengan demikian, pemerintah tidak menjalankan seluruh agenda secara bersamaan, tetapi memusatkan sumber daya pada area yang paling menentukan, seperti regulasi, pelayanan investasi, promosi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan hilirisasi.

Tahap berikutnya adalah **Roadmap**, yaitu kerangka waktu yang mengatur urutan pelaksanaan reformasi. Roadmap memastikan bahwa agenda jangka pendek, menengah, dan panjang memiliki hubungan yang jelas. Reformasi kelembagaan ditempatkan sebagai fondasi, dilanjutkan dengan akselerasi investasi, transformasi industri, dan penguatan daya saing global.

Roadmap kemudian dijabarkan menjadi **Action Plan**. Inilah tahap yang mengubah arah kebijakan menjadi tindakan operasional. Setiap rekomendasi perlu dilengkapi dengan kegiatan, penanggung jawab, target waktu, indikator kinerja, kebutuhan anggaran, risiko, dan mekanisme evaluasi. Dengan adanya action plan, dokumen kebijakan dapat langsung digunakan sebagai pedoman implementasi.

Selanjutnya, action plan diintegrasikan ke dalam **Program OPD**. Tahap ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada penerjemahan kebijakan ke dalam Renstra, Renja, RKPA, program lintas perangkat daerah, serta dukungan pembiayaan. DPMPTSP dapat menjadi leading sector, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi dengan Bappeda, Biro Hukum, BPKA, dinas teknis, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pelaksanaan program menghasilkan **Output**, berupa produk langsung seperti regulasi yang telah direvisi, layanan digital, Investment Help Desk, katalog IPRO, forum investasi, infrastruktur pendukung, tenaga kerja tersertifikasi, atau proyek hilirisasi yang siap ditawarkan.

Output tersebut selanjutnya harus menghasilkan **Outcome**, yaitu perubahan pada kualitas tata kelola dan perilaku sistem. Contohnya adalah pelayanan perizinan yang lebih cepat, meningkatnya kepuasan investor, bertambahnya proyek siap investasi, menurunnya biaya transaksi, membaiknya koordinasi antarlembaga, dan meningkatnya kepercayaan dunia usaha.

Puncak dari keseluruhan proses adalah **Dampak Investasi**. Dampak tidak hanya diukur dari kenaikan nilai realisasi investasi, tetapi juga dari peningkatan kualitas investasi, penciptaan

lapangan kerja, pertumbuhan industri bernilai tambah, peningkatan ekspor, pemerataan investasi antarwilayah, serta penguatan ekonomi hijau dan halal.

Latar belakang visual yang menampilkan pelabuhan, kawasan industri, energi terbarukan, kota modern, dan keluarga memperkuat pesan bahwa reformasi investasi bukan semata-mata urusan administratif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pembangunan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, gambar ini dapat dimaknai sebagai **rantai hasil kebijakan**:

Temuan → Prioritas → Roadmap → Action Plan → Program → Output → Outcome → Dampak

Rangkaian tersebut menegaskan bahwa dampak investasi hanya dapat dicapai apabila setiap tahap memiliki hubungan yang jelas, penanggung jawab yang tegas, indikator yang terukur, dan mekanisme pengendalian yang konsisten.

3 Matriks Action Plan Reformasi

Kerangka implementasi yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi iklim investasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan, mulai dari identifikasi temuan, penetapan prioritas reformasi, penyusunan roadmap, hingga pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan arah kebijakan, melainkan juga oleh kemampuan menerjemahkan setiap agenda reformasi ke dalam langkah-langkah operasional yang dapat dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara terukur.

Oleh karena itu, setiap agenda reformasi perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam **Matriks Action Plan Reformasi Iklim Investasi Aceh 2027–2030**. Matriks ini disusun sebagai instrumen implementasi yang menghubungkan rekomendasi kebijakan dengan pelaksanaan program di lapangan. Melalui matriks ini, setiap prioritas reformasi diterjemahkan ke dalam komponen yang lebih operasional, meliputi permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, program dan kegiatan prioritas, penanggung jawab utama (*leading sector*), mitra pelaksana, horizon waktu pelaksanaan, indikator kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta strategi mitigasi terhadap berbagai risiko implementasi.

Dengan pendekatan tersebut, Action Plan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap roadmap, tetapi menjadi pedoman implementasi yang mampu mengarahkan sinkronisasi kebijakan, penganggaran, pelaksanaan program, dan mekanisme monitoring serta evaluasi. Kehadiran matriks ini juga memperkuat hubungan antara hasil asesmen dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat langsung diintegrasikan ke dalam Renstra OPD, Renja Perangkat Daerah, RKPA, maupun dokumen pengendalian pembangunan investasi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan kerangka tersebut, bagian berikut menyajikan **Matriks Action Plan Reformasi Iklim Investasi Aceh Tahun 2027–2030** yang disusun berdasarkan delapan agenda prioritas reformasi. Setiap matriks menggambarkan langkah implementasi secara sistematis sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan iklim investasi Aceh yang lebih kompetitif, hijau, halal, dan berkelanjutan.

3.1 Prioritas I: Penguatan Regulasi Investasi

A. Narasi Pengantar

Hasil Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026 menunjukkan bahwa efektivitas regulasi merupakan salah satu dimensi dengan capaian terendah dalam Indeks Iklim Investasi Aceh. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai regulasi yang mengatur kegiatan investasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tumpang tindih kebijakan, harmonisasi antara Qanun Aceh dengan regulasi nasional yang belum sepenuhnya selaras, kompleksitas prosedur administratif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan informasi regulasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya transaksi (*transaction costs*), bertambahnya waktu penyelesaian perizinan, serta menurunnya tingkat kepastian hukum yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Dalam perspektif *New Institutional Economics*, kualitas regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Regulasi yang sederhana, konsisten, transparan, dan adaptif akan meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi ketidakpastian usaha, serta mempercepat proses realisasi investasi. Oleh karena itu, reformasi regulasi ditempatkan sebagai prioritas pertama dalam agenda transformasi iklim investasi Aceh karena menjadi prasyarat bagi keberhasilan reformasi pelayanan investasi, promosi investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sektor-sektor unggulan lainnya.

Reformasi regulasi tidak hanya dimaknai sebagai penyederhanaan aturan, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem tata kelola regulasi yang lebih berkualitas melalui audit regulasi, harmonisasi kebijakan, penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), digitalisasi regulasi, serta penyusunan *Investment Regulatory Roadmap* sebagai pedoman reformasi jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap dinamika investasi nasional maupun global.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.1 Matriks Action Plan Penguatan Regulasi Investasi

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Efektivitas regulasi investasi belum optimal sehingga menghambat kepastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, dan memperpanjang proses investasi.
Tujuan	Mewujudkan sistem regulasi investasi yang sederhana, harmonis, adaptif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
Sasaran	Terbangunnya kerangka regulasi investasi yang sinkron antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh serta mendukung kemudahan berusaha.
Program Prioritas	Reformasi Regulasi Investasi
Kegiatan Utama	Audit seluruh regulasi investasi di tingkat provinsi. Inventarisasi dan pemetaan seluruh Qanun, Pergub, dan regulasi sektoral

Komponen	Rencana Implementasi
	yang berkaitan dengan investasi. Harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional. Penyusunan *Investment Regulatory Roadmap*. Penerapan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* sebelum penerbitan regulasi baru. Digitalisasi regulasi melalui Portal Regulasi Investasi Aceh.
Leading Sector	DPMPTSP Aceh
Supporting Agency	Bappeda Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, DPR Aceh, Kanwil Kementerian Hukum, Kementerian Investasi/BKPM, OPD teknis terkait.
Periode Implementasi	Tahun 2027 (Quick Wins) dan berlanjut sebagai program berkelanjutan.
Output	Dokumen Audit Regulasi Investasi. Database Regulasi Investasi Aceh. Investment Regulatory Roadmap. Portal Regulasi Investasi Digital.
Outcome	Regulasi investasi lebih sederhana, harmonis, mudah diakses, serta meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Indikator Kinerja (KPI)	Penurunan rata-rata waktu penyelesaian perizinan minimal 30%. 100% regulasi investasi terdigitalisasi. Seluruh regulasi strategis telah direviu menggunakan metode RIA. Meningkatnya nilai Dimensi Efektivitas Regulasi pada Indeks Iklim Investasi Aceh.
Potensi Risiko	Resistensi perubahan regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas penyusun regulasi, serta perubahan kebijakan nasional.
Strategi Mitigasi	Pembentukan Tim Reformasi Regulasi Investasi, konsultasi publik, peningkatan kapasitas penyusun regulasi, serta koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait.

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Audit Regulasi Investasi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan audit secara menyeluruh terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan investasi di Provinsi Aceh. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, maupun yang menimbulkan hambatan administratif bagi investor.

Audit dilakukan melalui pemetaan seluruh Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, keputusan kepala daerah, standar operasional prosedur, serta berbagai kebijakan sektoral yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan investasi. Hasil audit menjadi dasar penyusunan agenda deregulasi dan simplifikasi regulasi investasi.

2. Inventarisasi dan Harmonisasi Regulasi

Seluruh regulasi yang telah dipetakan kemudian dikelompokkan berdasarkan sektor investasi, jenis pelayanan, kewenangan, serta tingkat urgensinya. Tahapan ini bertujuan memastikan tidak terdapat konflik norma antara kebijakan Pemerintah Aceh dengan regulasi pemerintah pusat maupun kebijakan lintas sektor.

Harmonisasi juga dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan kawasan industri, pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi, serta sektor-sektor prioritas investasi lainnya sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi investor.

3. Penyusunan Investment Regulatory Roadmap

Berdasarkan hasil audit dan harmonisasi, Pemerintah Aceh perlu menyusun *Investment Regulatory Roadmap* sebagai panduan reformasi regulasi dalam jangka menengah. Roadmap ini memuat daftar regulasi yang harus direvisi, disederhanakan, dicabut, atau disusun baru beserta tahapan implementasi dan target penyelesaiannya.

Keberadaan roadmap akan memastikan reformasi regulasi berlangsung secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, serta tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan daerah.

4. Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)

Setiap rancangan regulasi baru perlu melalui proses *Regulatory Impact Assessment* (RIA) guna memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan. Melalui RIA, pemerintah dapat menilai dampak ekonomi, sosial, administrasi, dan investasi sebelum suatu regulasi ditetapkan.

Penerapan RIA juga menjadi instrumen penting untuk mencegah lahirnya regulasi yang menambah beban administrasi atau mengurangi daya saing investasi daerah.

5. Digitalisasi Regulasi

Seluruh regulasi investasi perlu diintegrasikan dalam **Portal Regulasi Investasi Aceh** yang menyediakan informasi hukum secara lengkap, mutakhir, mudah diakses, dan terhubung dengan sistem pelayanan investasi. Portal ini memungkinkan investor memperoleh kepastian mengenai persyaratan, prosedur, biaya, serta dasar hukum investasi secara cepat dan transparan.

Digitalisasi regulasi juga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik sekaligus mengurangi potensi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan pelayanan investasi.

D. Critical Succes Factors

Keberhasilan reformasi regulasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci berikut.

1. **Komitmen politik** dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam mendukung agenda deregulasi dan harmonisasi kebijakan.
2. **Koordinasi lintas perangkat daerah** agar tidak terjadi ego sektoral dalam penyusunan maupun implementasi regulasi.

3. **Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat**, khususnya kebijakan investasi dan kemudahan berusaha.
4. **Peningkatan kapasitas aparatur**, terutama dalam penyusunan regulasi berbasis bukti (*evidence-based regulation*) dan penerapan *Regulatory Impact Assessment*.
5. **Partisipasi dunia usaha, akademisi, dan masyarakat**, melalui konsultasi publik untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan investasi sekaligus tetap memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Reformasi regulasi merupakan langkah awal dalam membangun iklim investasi yang lebih kondusif. Oleh karena itu, implementasi pada tahun pertama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan perbaikan nyata terhadap kualitas regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan investasi. *Quick Wins* ini diharapkan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan reformasi investasi yang lebih komprehensif pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.2: Matriks Quick Wins Penguatan Regulasi Investasi Tahun 2027

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Pembentukan Tim Reformasi Regulasi Investasi Aceh	Tim lintas sektor terbentuk melalui Keputusan Gubernur	Gubernur Aceh, DPMPTSP	Tim aktif melaksanakan koordinasi dan rapat berkala
2	Audit regulasi investasi	Seluruh regulasi investasi diinventarisasi dan dipetakan	DPMPTSP, Biro Hukum	Dokumen Audit Regulasi selesai disusun
3	Penyusunan Investment Regulatory Roadmap	Roadmap reformasi regulasi 2027–2030 disahkan	DPMPTSP, Bappeda	Dokumen roadmap menjadi acuan reformasi
4	Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)	RIA diterapkan pada regulasi investasi prioritas	Biro Hukum, DPMPTSP	Minimal lima regulasi strategis dianalisis menggunakan RIA
5	Digitalisasi regulasi investasi	Seluruh regulasi investasi tersedia dalam Portal Regulasi Investasi Aceh	DPMPTSP, Diskominsa	Portal aktif dan dapat diakses publik
6	Forum Konsultasi Publik Regulasi	Konsultasi dengan dunia usaha, akademisi, dan asosiasi investasi dilaksanakan secara berkala	DPMPTSP	Minimal dua forum konsultasi diselenggarakan pada tahun 2027

Pelaksanaan *Quick Wins* pada tahun pertama diarahkan untuk membangun fondasi kelembagaan reformasi regulasi sekaligus menghasilkan perbaikan yang dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha. Pembentukan **Tim Reformasi Regulasi Investasi Aceh** menjadi langkah awal dalam memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan secara efektif.

Tim ini bertugas mengawal proses audit regulasi, harmonisasi kebijakan, serta penyusunan agenda reformasi yang terintegrasi.

Audit regulasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Qanun, Peraturan Gubernur, dan regulasi sektoral yang berkaitan dengan investasi. Hasil audit menjadi dasar penyusunan **Investment Regulatory Roadmap**, yang memuat daftar regulasi yang perlu dipertahankan, disempurnakan, disederhanakan, atau dicabut. Selanjutnya, penerapan **Regulatory Impact Assessment (RIA)** memastikan bahwa setiap perubahan regulasi didasarkan pada analisis manfaat, biaya, dan dampaknya terhadap iklim investasi.

Sebagai bagian dari transformasi tata kelola, Pemerintah Aceh juga perlu mengembangkan **Portal Regulasi Investasi Aceh** yang menyediakan informasi regulasi secara lengkap, mutakhir, dan mudah diakses oleh investor. Portal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum melalui penyediaan informasi regulasi dalam satu pintu.

Di sisi lain, penyelenggaraan **Forum Konsultasi Publik Regulasi** menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan dunia usaha, akademisi, asosiasi profesi, dan masyarakat diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah.

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027)

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan perubahan awal yang terukur sebagai fondasi bagi reformasi regulasi investasi pada periode berikutnya.

Tabel 3.3 Expected Early Results Reformasi Regulasi Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Regulasi investasi yang telah diaudit	100% regulasi strategis
Regulasi prioritas yang direviu menggunakan RIA	Minimal 5 regulasi
Investment Regulatory Roadmap	1 dokumen ditetapkan
Portal Regulasi Investasi Aceh	Beroperasi dan dapat diakses publik
Regulasi investasi terdigitalisasi	100%
Forum konsultasi publik	Minimal 2 kali pelaksanaan
Penurunan rata-rata waktu identifikasi dan klarifikasi regulasi	≥20%
Peningkatan nilai Dimensi Efektivitas Regulasi pada Indeks Iklim Investasi Aceh	Meningkat dibanding tahun dasar 2026

Keterkaitan dengan Roadmap Reformasi

Quick Wins Tahun 2027 merupakan tahap **Institutional Strengthening** sebagaimana diuraikan dalam *Roadmap Reformasi Iklim Investasi Aceh 2027–2030*. Fokus utama pada fase ini adalah membangun fondasi tata kelola regulasi melalui penyederhanaan kebijakan,

harmonisasi regulasi, digitalisasi informasi hukum, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Keberhasilan pada tahap ini akan menjadi prasyarat bagi pelaksanaan reformasi pelayanan investasi, modernisasi promosi, percepatan hilirisasi industri, serta pengembangan investasi hijau dan ekonomi syariah pada fase-fase berikutnya.

3.2 Prioritas II: Reformasi Pelayanan Investasi

A. Narasi Pengantar

Hasil Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan investasi masih menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan daya saing investasi daerah. Meskipun sistem pelayanan perizinan telah mengalami berbagai perbaikan, hasil survei dan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa investor masih menghadapi berbagai kendala berupa koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, proses pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan pendampingan investasi, serta belum tersedianya mekanisme pemantauan proses perizinan secara real time. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya waktu penyelesaian layanan, ketidakpastian proses administrasi, serta menurunnya persepsi investor terhadap kemudahan berusaha di Provinsi Aceh.

Dalam paradigma tata kelola investasi modern, pelayanan investasi tidak lagi dipahami hanya sebagai fungsi administratif dalam penerbitan perizinan, tetapi telah berkembang menjadi fungsi fasilitasi investasi (*investment facilitation*). Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menerbitkan izin secara cepat, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang mendampingi investor sejak tahap penjajakan investasi, proses perizinan, realisasi proyek, hingga penyelesaian berbagai hambatan yang muncul selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan demikian, kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investor dalam memilih lokasi investasi.

Atas dasar tersebut, reformasi pelayanan investasi diarahkan pada pembangunan sistem pelayanan yang cepat, transparan, responsif, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital. Reformasi dilakukan melalui penguatan pelayanan terpadu, pengembangan *Investment Help Desk*, penerapan *Service Level Agreement* (SLA), pemanfaatan *Digital Tracking System*, serta penyelenggaraan mekanisme *Fast Track Investment* bagi proyek-proyek strategis. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelola investasi di Aceh.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.4: Matriks Action Plan Reformasi Pelayanan Investasi

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Pelayanan investasi belum sepenuhnya terintegrasi, koordinasi antarperangkat daerah masih terbatas, serta belum optimalnya pendampingan investor.
Tujuan	Mewujudkan sistem pelayanan investasi yang cepat, transparan, terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan investor (*Excellent Investment Service*).

Komponen	Rencana Implementasi
Sasaran	Terbangunnya pelayanan investasi berbasis digital yang memberikan kepastian waktu, kemudahan proses, dan pendampingan investasi secara menyeluruh.
Program Prioritas	Reformasi Pelayanan Investasi
Kegiatan Utama	Pengembangan OSS Daerah yang terintegrasi. Pembentukan **Investment Help Desk**. Penerapan **Digital Tracking System**. Penyusunan dan penerapan **Service Level Agreement (SLA)**. Penyelenggaraan **Fast Track Investment** bagi proyek strategis. Penguatan kapasitas petugas pelayanan investasi (*front office* dan *back office*).
Leading Sector	DPMPTSP Aceh
Supporting Agency	Seluruh OPD teknis, Bappeda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Inspektorat Aceh, Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2028 sebagai tahap akselerasi reformasi pelayanan.
Output	OSS Daerah terintegrasi. Investment Help Desk beroperasi. Digital Tracking System aktif. Standar Pelayanan dan SLA diterapkan. Mekanisme Fast Track Investment berjalan.
Outcome	Pelayanan investasi menjadi lebih cepat, transparan, mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan investor.
Indikator Kinerja (KPI)	Minimal 95% pelayanan perizinan selesai sesuai SLA. Nilai Kepuasan Investor di atas 90. Penurunan rata-rata waktu penyelesaian perizinan minimal 30%. 100% investor dapat memantau status permohonan secara digital. Meningkatnya nilai Dimensi Pelayanan Investasi pada Indeks Iklim Investasi Aceh.
Potensi Risiko	Ego sektoral antarperangkat daerah, keterbatasan integrasi sistem informasi, rendahnya kapasitas SDM pelayanan, serta resistensi terhadap perubahan prosedur kerja.
Strategi Mitigasi	Pembentukan Forum Koordinasi Investasi, integrasi sistem informasi lintas OPD, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara periodik.

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Pengembangan OSS Daerah Terintegrasi

Reformasi pelayanan investasi diawali dengan penguatan sistem **Online Single Submission (OSS) Daerah** yang terintegrasi dengan OSS nasional dan seluruh perangkat daerah teknis.

Integrasi ini bertujuan menghilangkan proses pelayanan yang bersifat parsial, mengurangi duplikasi persyaratan administrasi, serta mempercepat proses penerbitan perizinan melalui satu platform pelayanan yang terpadu.

Selain memberikan kemudahan bagi investor, OSS Daerah juga menjadi instrumen pengendalian internal pemerintah dalam memantau kinerja pelayanan, meningkatkan transparansi proses administrasi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan investasi.

2. Pembentukan Investment Help Desk

Pemerintah Aceh perlu membentuk **Investment Help Desk** sebagai pusat layanan konsultasi dan pendampingan investasi. Unit ini berfungsi memberikan informasi mengenai peluang investasi, persyaratan perizinan, insentif investasi, penyelesaian kendala administrasi, hingga fasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Keberadaan Investment Help Desk mencerminkan perubahan paradigma pelayanan, di mana pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penerbit izin, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi investor sepanjang siklus investasi (*investment life cycle*).

3. Penerapan Digital Tracking System

Untuk meningkatkan transparansi pelayanan, setiap proses perizinan perlu dilengkapi dengan **Digital Tracking System** yang memungkinkan investor memantau perkembangan permohonannya secara daring (*real time*). Sistem ini memberikan informasi mengenai tahapan proses, waktu penyelesaian, perangkat daerah yang sedang memproses dokumen, serta estimasi penyelesaian pelayanan.

Penerapan sistem pelacakan digital tidak hanya meningkatkan kepastian pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparatur serta mengurangi potensi terjadinya keterlambatan maupun praktik pelayanan yang tidak transparan.

4. Penerapan Service Level Agreement (SLA)

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, setiap jenis pelayanan investasi perlu memiliki **Service Level Agreement (SLA)** yang menetapkan standar waktu penyelesaian, kualitas pelayanan, mekanisme penanganan pengaduan, serta hak dan kewajiban pengguna layanan.

SLA menjadi instrumen pengendalian kinerja pelayanan sekaligus dasar evaluasi terhadap capaian perangkat daerah dalam memberikan pelayanan investasi yang profesional, cepat, dan akuntabel.

5. Fast Track Investment

Untuk proyek-proyek investasi strategis yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Aceh perlu menerapkan mekanisme **Fast Track Investment**. Melalui skema ini, investor memperoleh pendampingan khusus, percepatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyelesaian hambatan

administrasi secara lebih cepat tanpa mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Aceh dalam menarik investasi berskala besar sekaligus memberikan sinyal positif mengenai komitmen pemerintah terhadap kemudahan berusaha.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan reformasi pelayanan investasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci berikut.

1. **Komitmen pimpinan daerah** dalam menjadikan pelayanan investasi sebagai prioritas reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah.
2. **Integrasi sistem pelayanan lintas perangkat daerah**, sehingga seluruh proses perizinan dapat dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan terpadu tanpa duplikasi prosedur.
3. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, khususnya aparatur pelayanan investasi, agar memiliki kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, dan orientasi pelayanan kepada investor.
4. **Pemanfaatan teknologi digital** untuk mendukung pelayanan yang transparan, efisien, mudah diakses, dan dapat dipantau secara real time.
5. **Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja**, melalui penerapan indikator pelayanan yang terukur, survei kepuasan investor, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian SLA sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Keberhasilan reformasi pelayanan investasi sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Aceh menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara cepat (*quick wins*) pada tahun pertama implementasi. Program-program awal ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan investor, serta membangun fondasi bagi transformasi pelayanan investasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus implementasi pada Tahun 2027 diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kemudahan berusaha dan peningkatan kualitas layanan.

Tabel 3.5 Quick Wins Reformasi Pelayanan Investasi Tahun 2027

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Pembentukan **Investment Help Desk Aceh**	Help Desk beroperasi sebagai pusat layanan investasi terpadu	DPMPTSP	Help Desk beroperasi dan melayani investor setiap hari kerja
2	Penyusunan dan penerapan **Service Level Agreement (SLA)**	Standar waktu pelayanan seluruh jenis perizinan ditetapkan	DPMPTSP bersama OPD Teknis	100% jenis layanan memiliki SLA
3	Implementasi **Digital Tracking System**	Investor dapat memantau status	DPMPTSP dan Diskominsa Aceh	Sistem aktif dan dapat diakses secara daring

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
		permohonan secara *real time*		
4	Integrasi pelayanan lintas OPD	Seluruh proses pelayanan strategis dilakukan melalui mekanisme terpadu	DPMPTSP bersama OPD Teknis	Berkurangnya proses pelayanan yang dilakukan secara manual
5	Pelatihan SDM Pelayanan Investasi	Seluruh petugas pelayanan mengikuti pelatihan *Excellent Service*	DPMPTSP dan BKPSDM	Minimal 100 petugas memperoleh sertifikat pelatihan
6	Survei Kepuasan Investor berbasis digital	Survei dilaksanakan setiap semester	DPMPTSP	Nilai kepuasan investor minimal 90

Pelaksanaan *Quick Wins* pada tahun pertama diharapkan menghasilkan perubahan yang dapat segera dirasakan oleh investor maupun perangkat daerah. Pembentukan **Investment Help Desk** menjadi simbol transformasi pelayanan yang lebih proaktif, sementara penerapan **Service Level Agreement (SLA)** memberikan kepastian mengenai standar waktu dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, implementasi **Digital Tracking System** meningkatkan transparansi proses perizinan sehingga investor dapat memantau perkembangan permohonannya secara mandiri.

Integrasi pelayanan lintas perangkat daerah akan mengurangi fragmentasi proses administrasi dan mempercepat koordinasi dalam penyelesaian perizinan. Selanjutnya, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima menjadi faktor penting untuk membangun budaya pelayanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan investor. Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan survei kepuasan investor secara berkala sebagai instrumen evaluasi dan penyempurnaan pelayanan.

Dengan terlaksananya *Quick Wins* tersebut, Pemerintah Aceh diharapkan mampu membangun **kepercayaan awal (early confidence building)** dari kalangan investor. Keberhasilan pada tahun pertama akan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan agenda reformasi pelayanan investasi pada tahun-tahun berikutnya serta mempercepat pencapaian target peningkatan daya saing investasi daerah.

3.3 Prioritas III: Modernisasi Promosi Investasi

A. Narasi Pengantar

Hasil Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026 menunjukkan bahwa promosi investasi masih didominasi oleh pendekatan berbasis kegiatan (*event-based promotion*), seperti partisipasi dalam pameran, forum investasi, dan kunjungan promosi. Meskipun kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan eksposur daerah, efektivitasnya dalam menghasilkan realisasi investasi masih belum optimal. Salah satu penyebab utama adalah terbatasnya ketersediaan proyek investasi yang telah dikemas secara profesional, kurangnya

informasi investasi yang mudah diakses oleh calon investor, serta belum terbangunnya strategi pemasaran investasi yang terintegrasi dan berbasis data.

Dalam praktik terbaik internasional, promosi investasi telah bergeser dari pendekatan promosi konvensional menuju **investment marketing**, yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan data, analisis pasar, segmentasi investor, dan penyediaan proyek siap investasi (*Investment Project Ready to Offer/IPRO*). Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penyelenggara kegiatan promosi, tetapi juga sebagai penyedia informasi investasi yang kredibel, fasilitator hubungan bisnis, dan pengembang citra investasi daerah (*investment branding*).

Bagi Provinsi Aceh, modernisasi promosi investasi menjadi sangat penting mengingat daerah ini memiliki keunggulan komparatif pada sektor agroindustri, perkebunan, perikanan, energi, pariwisata, industri halal, dan ekonomi hijau. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi portofolio proyek investasi yang menarik bagi investor domestik maupun internasional. Oleh karena itu, reformasi promosi investasi diarahkan pada pengembangan **Aceh Investment Portal**, penyusunan **Digital Investment Catalogue**, pengembangan **Investment Project Ready to Offer (IPRO)**, pelaksanaan promosi investasi yang lebih terarah pada pasar potensial, serta pembangunan identitas daerah melalui branding **"Invest in Aceh"**.

Melalui pendekatan tersebut, promosi investasi tidak hanya bertujuan meningkatkan visibilitas Aceh di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah investor potensial, mempercepat proses penjajakan investasi (*investment pipeline*), serta meningkatkan realisasi investasi yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.6: Matriks Action Plan Modernisasi Promosi Investasi

Komponen	**Rencana Implementasi**
Isu Strategis	Promosi investasi masih bersifat konvensional, belum berbasis data, dan belum didukung proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor.
Tujuan	Membangun sistem promosi investasi yang modern, terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan realisasi investasi.
Sasaran	Terwujudnya ekosistem promosi investasi yang mampu menarik investor potensial dan menghasilkan proyek investasi yang siap direalisasikan.
Program Prioritas	Modernisasi Promosi Investasi
Kegiatan Utama	Pengembangan **Aceh Investment Portal**. Penyusunan **Digital Investment Catalogue**. Penyusunan minimal **50 Investment Project Ready to Offer (IPRO)**. Roadshow investasi ke negara-negara ASEAN. Roadshow investasi ke kawasan Timur Tengah. Penyelenggaraan **Investor Gathering** secara berkala. Pembangunan branding investasi **"Invest in Aceh"**. Optimalisasi promosi digital melalui media sosial dan platform investasi internasional.

Komponen	Rencana Implementasi
Leading Sector	DPMPTSP Aceh
Supporting Agency	Bappeda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Pariwisata Aceh, KADIN Aceh, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri, KBRI, Atase Perdagangan, dan pelaku usaha.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2028 sebagai fase penguatan promosi investasi berbasis digital dan pengembangan portofolio proyek investasi.
Output	Aceh Investment Portal beroperasi. Digital Investment Catalogue tersedia. Minimal 50 dokumen IPRO tersusun. Roadshow investasi terlaksana. Investor Gathering diselenggarakan secara berkala. Branding "Invest in Aceh" diluncurkan.
Outcome	Meningkatnya jumlah investor potensial, bertambahnya proyek investasi yang dipromosikan, serta meningkatnya realisasi investasi di Provinsi Aceh.
Indikator Kinerja (KPI)	Minimal 50 dokumen IPRO tersedia. 10 investor potensial melakukan penjajakan investasi. 5 proyek investasi memasuki tahap realisasi. Peningkatan jumlah kunjungan ke Aceh Investment Portal. Peningkatan nilai promosi investasi pada Indeks Iklim Investasi Aceh.
Potensi Risiko	Keterbatasan proyek investasi yang siap ditawarkan, rendahnya koordinasi promosi lintas sektor, keterbatasan anggaran promosi, serta dinamika ekonomi global yang memengaruhi minat investor.
Strategi Mitigasi	Penyusunan IPRO secara kolaboratif, penguatan koordinasi promosi lintas OPD, kemitraan dengan BKPM dan KBRI, pemanfaatan promosi digital, serta diversifikasi pasar sasaran investasi.

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Pengembangan Aceh Investment Portal

Pemerintah Aceh perlu mengembangkan **Aceh Investment Portal** sebagai pusat informasi investasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh investor domestik maupun internasional. Portal ini tidak hanya menyajikan informasi mengenai peluang investasi, tetapi juga memuat profil sektor unggulan, regulasi investasi, insentif, data ekonomi, peta potensi wilayah, layanan konsultasi, serta akses menuju sistem pelayanan perizinan.

Portal investasi menjadi etalase digital Provinsi Aceh yang mampu memberikan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sehingga memperkuat citra daerah sebagai tujuan investasi yang terbuka, transparan, dan kompetitif.

2. Penyusunan Digital Investment Catalogue

Sebagai instrumen pemasaran investasi, Pemerintah Aceh perlu menyusun **Digital Investment Catalogue** yang memuat daftar peluang investasi berdasarkan sektor prioritas, lokasi, nilai investasi, kebutuhan infrastruktur, skema kerja sama, serta proyeksi manfaat ekonomi. Katalog ini disusun dalam format digital, bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), serta diperbarui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan proyek dan kebutuhan investor.

3. Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO)

Salah satu kelemahan promosi investasi adalah belum tersedianya proyek yang telah dipersiapkan secara komprehensif. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menyusun minimal **50 Investment Project Ready to Offer (IPRO)** yang memenuhi standar kelayakan investasi.

Setiap IPRO memuat informasi mengenai lokasi, status lahan, analisis pasar, estimasi investasi, proyeksi keuntungan, dukungan infrastruktur, aspek legal, serta potensi risiko. Dengan demikian, investor dapat segera melakukan proses *due diligence* dan pengambilan keputusan investasi.

4. Roadshow Investasi

Promosi investasi perlu diarahkan pada pasar yang memiliki potensi tinggi terhadap sektor unggulan Aceh. Roadshow ke negara-negara ASEAN difokuskan untuk menarik investasi manufaktur, logistik, dan agroindustri, sedangkan promosi ke kawasan Timur Tengah diarahkan pada investasi syariah, energi, pariwisata halal, dan infrastruktur.

Roadshow tidak hanya berupa presentasi peluang investasi, tetapi juga mencakup *business matching*, *one-on-one meeting*, penandatanganan nota kesepahaman, serta tindak lanjut terhadap investor potensial.

5. Investor Gathering dan Branding "Invest in Aceh"

Investor Gathering diselenggarakan secara berkala sebagai forum dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan calon investor untuk membahas peluang investasi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Aceh perlu membangun identitas promosi melalui branding **"Invest in Aceh"** yang mencerminkan keunggulan daerah, kepastian investasi, serta komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Branding tersebut harus diterapkan secara konsisten pada seluruh media promosi, portal investasi, publikasi resmi, forum bisnis, dan kegiatan pemasaran internasional sehingga terbentuk citra Aceh sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan terpercaya.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan modernisasi promosi investasi ditentukan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut.

1. **Ketersediaan proyek investasi yang siap ditawarkan (IPRO)** dengan standar informasi yang lengkap dan layak secara ekonomi.

2. **Penguatan identitas promosi daerah (investment branding)** yang konsisten dan mudah dikenali oleh investor.
3. **Kolaborasi lintas lembaga**, termasuk DPMPTSP, Bappeda, KADIN, BKPM, KBRI, asosiasi bisnis, dan pelaku usaha dalam melaksanakan promosi investasi.
4. **Pemanfaatan teknologi digital** untuk memperluas jangkauan promosi dan menyediakan informasi investasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses.
5. **Pendekatan promosi berbasis pasar sasaran (targeted investment promotion)** sehingga sumber daya promosi difokuskan pada sektor dan negara yang memiliki peluang investasi terbesar bagi Aceh.

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Modernisasi promosi investasi perlu diawali dengan pembentukan perangkat promosi yang mampu memberikan hasil cepat serta meningkatkan visibilitas Aceh di hadapan investor. Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada penyediaan informasi investasi yang berkualitas, penyusunan proyek siap investasi, dan penguatan jejaring promosi internasional.

Tabel 3.7 Quick Wins Modernisasi Promosi Investasi Tahun 2027

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Peluncuran **Aceh Investment Portal**	Portal aktif dan dapat diakses publik	DPMPTSP	Portal beroperasi dengan konten investasi yang lengkap
2	Penyusunan **Digital Investment Catalogue**	Katalog digital bilingual diterbitkan	DPMPTSP	Katalog tersedia secara daring
3	Penyusunan **50 IPRO**	50 proyek siap investasi selesai disusun	DPMPTSP, OPD Teknis	Dokumen IPRO siap dipromosikan
4	Roadshow investasi ASEAN	Minimal 2 kegiatan promosi dilaksanakan	DPMPTSP, BKPM	Terlaksananya forum bisnis dan *business matching*
5	Investor Gathering Aceh	Minimal 2 forum investor diselenggarakan	DPMPTSP, KADIN	Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat
6	Peluncuran branding **"Invest in Aceh"**	Identitas promosi digunakan pada seluruh media resmi	DPMPTSP	Branding diterapkan secara konsisten

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027)

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan peningkatan kualitas promosi investasi yang lebih terukur dan berdampak terhadap pembentukan *investment pipeline*.

Tabel 3.8: Expected Early Results Modernisasi Promosi Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Aceh Investment Portal	Beroperasi penuh
Digital Investment Catalogue	1 dokumen digital bilingual
Investment Project Ready to Offer (IPRO)	≥ 50 proyek
Investor potensial (*investment leads*)	≥ 10 investor
Letter of Intent (LoI)/Nota Minat	≥ 5 dokumen
Proyek memasuki tahap realisasi	≥ 5 proyek
Kegiatan promosi internasional	≥ 4 kegiatan
Nilai promosi pada Indeks Iklim Investasi Aceh	Meningkat dibanding tahun dasar 2026

Dengan pendekatan ini, promosi investasi tidak lagi diukur dari **jumlah kegiatan** yang diselenggarakan, melainkan dari **jumlah peluang investasi yang dikembangkan, minat investor yang berhasil dibangun, dan proyek investasi yang benar-benar terealisasi**. Pergeseran orientasi dari *activity-based promotion* menuju *result-based investment promotion* inilah yang menjadi inti modernisasi promosi investasi Aceh untuk periode 2027–2030.

3.4 Prioritas IV: Pengembangan Infrastruktur Strategis

A. Narasi Pengantar

Hasil Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026 menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam menurunkan biaya logistik, mempercepat mobilitas barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat efisiensi rantai pasok (*supply chain*). Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur transportasi, energi, utilitas dasar, dan konektivitas digital menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi keputusan investor dalam memilih lokasi investasi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan **enabling factor** yang memungkinkan kegiatan investasi berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur tidak dapat dipandang hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai investasi strategis yang mampu menciptakan kawasan ekonomi yang kompetitif, meningkatkan produktivitas industri, serta memperkuat keterhubungan Aceh dengan pasar nasional maupun internasional.

Agenda reformasi infrastruktur dalam dokumen ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang secara langsung mendukung kegiatan investasi, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan industri, penguatan pelabuhan ekspor, pengembangan kawasan logistik terpadu, penyediaan listrik yang andal bagi kawasan industri, penyediaan air baku, serta perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi. Seluruh program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing kawasan industri, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan Aceh.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.9 Matriks 6.4 Action Plan Pengembangan Infrastruktur Strategis

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Infrastruktur pendukung investasi belum sepenuhnya memadai sehingga meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi, dan mengurangi daya saing kawasan investasi.
Tujuan	Membangun infrastruktur strategis yang mendukung kelancaran investasi, meningkatkan konektivitas, serta menurunkan biaya logistik dan biaya operasional dunia usaha.
Sasaran	Terwujudnya kawasan investasi yang didukung oleh infrastruktur transportasi, logistik, energi, utilitas dasar, dan konektivitas digital yang memadai.
Program Prioritas	Pengembangan Infrastruktur Strategis
Kegiatan Utama	Peningkatan jalan menuju kawasan industri. Modernisasi pelabuhan ekspor. Pengembangan kawasan logistik terpadu. Penguatan jaringan listrik kawasan industri. Penyediaan air baku untuk kawasan investasi. Perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi. Penyusunan Masterplan Infrastruktur Pendukung Investasi.
Leading Sector	Bappeda Aceh
Supporting Agency	Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, DPMPTSP Aceh, PLN, PDAM, Pelindo, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2030 sesuai tahapan Roadmap Reformasi Iklim Investasi.
Output	Jalan akses kawasan industri meningkat. Pelabuhan ekspor ditingkatkan. Kawasan logistik terpadu tersedia. Pasokan listrik kawasan industri meningkat. Sistem penyediaan air baku tersedia. Internet berkecepatan tinggi menjangkau kawasan prioritas. Masterplan Infrastruktur Pendukung Investasi disusun.
Outcome	Menurunnya biaya logistik, meningkatnya konektivitas kawasan investasi, serta meningkatnya daya saing dan efisiensi kegiatan investasi.
Indikator Kinerja (KPI)	Penurunan biaya logistik minimal 15%. Penurunan waktu distribusi barang minimal 20%. 100% kawasan investasi prioritas memiliki akses jalan, listrik, air baku, dan internet berkecepatan tinggi. Meningkatnya nilai Dimensi Infrastruktur pada Indeks Iklim Investasi Aceh.
Potensi Risiko	Keterbatasan anggaran pembangunan, pembebasan lahan, koordinasi lintas sektor, keterlambatan proyek, serta rendahnya partisipasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Strategi Mitigasi	Penyusunan prioritas pembangunan berbasis kawasan investasi, optimalisasi pembiayaan melalui KPBU, penguatan koordinasi lintas

Komponen	Rencana Implementasi
	instansi, percepatan penyelesaian lahan, dan monitoring berkala terhadap proyek strategis.

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri

Konektivitas jalan merupakan prasyarat utama bagi kelancaran distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan menuju kawasan industri, pelabuhan, kawasan ekonomi, dan sentra produksi menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan yang memadai akan mengurangi biaya transportasi, mempercepat distribusi produk, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

2. Modernisasi Pelabuhan Ekspor

Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul perdagangan yang menghubungkan Aceh dengan pasar nasional maupun internasional. Modernisasi pelabuhan diarahkan pada peningkatan kapasitas bongkar muat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, penyediaan fasilitas logistik modern, serta peningkatan konektivitas dengan kawasan industri dan sentra produksi.

3. Pengembangan Kawasan Logistik Terpadu

Pemerintah Aceh perlu mengembangkan kawasan logistik terpadu yang mengintegrasikan fungsi pergudangan, distribusi, *cold storage*, pusat konsolidasi barang, dan layanan transportasi. Pengembangan kawasan logistik akan meningkatkan efisiensi rantai pasok serta mengurangi biaya distribusi komoditas unggulan daerah.

4. Penyediaan Listrik Kawasan Industri

Keandalan pasokan energi menjadi salah satu pertimbangan utama investor. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan listrik, pembangunan gardu induk pada kawasan industri, serta pengembangan sumber energi baru dan terbarukan sebagai alternatif penyediaan energi yang berkelanjutan.

5. Penyediaan Air Baku

Ketersediaan air baku yang berkelanjutan menjadi kebutuhan dasar bagi sektor industri, pertanian modern, dan kawasan ekonomi. Pemerintah Aceh perlu mengembangkan sistem penyediaan air baku melalui pembangunan embung, jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, serta perlindungan kawasan sumber air.

6. Pengembangan Internet Berkecepatan Tinggi

Transformasi digital dalam dunia usaha menuntut tersedianya konektivitas internet yang cepat, stabil, dan menjangkau seluruh kawasan investasi. Oleh karena itu, perluasan jaringan serat optik, peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi, dan pengembangan infrastruktur digital menjadi bagian integral dari pengembangan infrastruktur investasi.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan pengembangan infrastruktur strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut.

1. **Sinkronisasi perencanaan pembangunan** antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur mendukung kawasan investasi prioritas.
2. **Ketersediaan pembiayaan yang berkelanjutan**, baik melalui APBA, APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun investasi swasta.
3. **Percepatan penyelesaian pengadaan lahan** untuk menghindari keterlambatan pembangunan proyek strategis.
4. **Koordinasi lintas sektor** antara perangkat daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan infrastruktur berjalan terpadu.
5. **Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan**, dengan memperhatikan aspek lingkungan, ketahanan iklim, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Pembangunan infrastruktur strategis pada tahun pertama diarahkan pada penyediaan fondasi perencanaan, percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, serta peningkatan utilitas dasar yang secara langsung mendukung aktivitas investasi.

Tabel 3.10 Quick Wins Pengembangan Infrastruktur Strategis Tahun 2027

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Penyusunan **Masterplan Infrastruktur Pendukung Investasi**	Masterplan selesai dan ditetapkan	Bappeda Aceh	Dokumen menjadi acuan pembangunan
2	Identifikasi dan penetapan kawasan investasi prioritas	Kawasan prioritas ditetapkan	Bappeda, DPMPTSP	Daftar kawasan investasi tersedia
3	Peningkatan akses jalan menuju kawasan industri prioritas	Ruas jalan strategis mulai ditingkatkan	Dinas PUPR	Persentase peningkatan kondisi jalan
4	Penyusunan rencana modernisasi pelabuhan ekspor	Studi kelayakan selesai	Dinas Perhubungan, Pelindo	Dokumen *feasibility study* tersedia
5	Penyediaan utilitas dasar pada kawasan prioritas	Listrik, air baku, dan internet mulai tersedia	OPD Teknis, PLN, PDAM	Kawasan prioritas memperoleh layanan dasar
6	Penyusunan skema pembiayaan KPBU	Daftar proyek siap ditawarkan kepada investor	Bappeda, BPKA	Minimal dua proyek siap dikerjasamakan

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027)

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan peningkatan konektivitas dan utilitas dasar pada kawasan investasi prioritas sebagai fondasi percepatan pembangunan infrastruktur tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.11 Expected Early Results Pengembangan Infrastruktur Strategis Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Masterplan Infrastruktur Pendukung Investasi	1 dokumen ditetapkan
Kawasan investasi prioritas	100% teridentifikasi
Ruas jalan menuju kawasan prioritas	Minimal 30% dalam kondisi mantap atau meningkat
Studi modernisasi pelabuhan ekspor	1 dokumen selesai
Kawasan prioritas dengan utilitas dasar (listrik, air, internet)	≥50% kawasan prioritas
Proyek infrastruktur siap dibiayai melalui KPBU	Minimal 2 proyek
Penurunan biaya logistik	Mulai menunjukkan tren penurunan
Peningkatan nilai Dimensi Infrastruktur pada Indeks Iklim Investasi Aceh	Meningkat dibanding tahun dasar 2026

G. Peta Infrastruktur Pendukung Kawasan Investasi Prioritas

Pengembangan infrastruktur strategis perlu diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi investasi terbesar agar mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal. Berdasarkan hasil asesmen dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Aceh, pengembangan infrastruktur investasi diprioritaskan pada dua kawasan utama, yaitu **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe** sebagai pusat industri, logistik, energi, dan hilirisasi di wilayah utara Aceh, serta **Kawasan Industri Aceh (KIA)** di Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi sekitar 15 kilometer dari Kota Banda Aceh sebagai kawasan industri strategis yang mendukung aktivitas manufaktur, agroindustri, logistik, dan industri berbasis teknologi.

Kedua kawasan tersebut diproyeksikan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi (*growth poles*) yang mampu memperkuat konektivitas regional, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Aceh, serta menarik investasi domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pada periode 2027–2030 difokuskan pada penyediaan aksesibilitas, utilitas dasar, dan konektivitas digital yang mendukung operasional kedua kawasan tersebut.

Tabel 3.12 Kawasan Investasi Prioritas dan Infrastruktur Pendukung

Kawasan Prioritas	Sektor Unggulan	Infrastruktur Prioritas	Target Pengembangan 2027–2030
KEK Arun Lhokseumawe	Industri petrokimia, energi, logistik, hilirisasi sawit, pupuk, LNG, manufaktur	Peningkatan jalan akses kawasan industri, modernisasi Pelabuhan Arun, penguatan jaringan listrik industri, sistem air baku, jaringan gas, internet berkecepatan tinggi, kawasan logistik terpadu	Terwujud sebagai pusat industri dan logistik bertaraf internasional di wilayah barat Indonesia.
Kawasan Industri Aceh (KIA), Aceh Besar	Agroindustri, industri pangan, industri halal, logistik, manufaktur ringan, industri berbasis teknologi	Jalan akses menuju kawasan industri, konektivitas dengan Pelabuhan Malahayati dan Bandara Sultan Iskandar Muda, jaringan listrik, air baku, internet berkecepatan tinggi, pusat logistik regional	Terwujud sebagai kawasan industri modern yang mendukung investasi nasional dan internasional di wilayah barat Indonesia.

Koridor Infrastruktur Pendukung

Selain pengembangan kawasan industri, Pemerintah Aceh perlu membangun **koridor infrastruktur investasi** yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara sehingga terbentuk jaringan logistik yang efisien.

Koridor Utara Aceh

KEK Arun Lhokseumawe
↓
Pelabuhan Arun
↓
Jalan Nasional Banda Aceh–Medan
↓
Sentra Perkebunan Sawit
↓
Kawasan Hilirisasi Industri

Fokus pengembangan:

- peningkatan kapasitas jalan logistik;
- modernisasi pelabuhan;
- penguatan jaringan energi;
- kawasan pergudangan dan distribusi;
- integrasi kawasan industri dengan sentra bahan baku.

Koridor Banda Aceh–Aceh Besar

Bandara Sultan Iskandar Muda
⬇
Kawasan Industri Aceh (KIA)
⬇
Pelabuhan Malahayati
⬇
Kawasan Perdagangan Banda Aceh

Fokus pengembangan:

- jalan akses kawasan industri;
- dry port dan pusat logistik;
- jaringan utilitas industri;
- digital connectivity;
- pusat inovasi industri.

Prioritas Infrastruktur Tahun 2027

Sebagai tahap awal implementasi, pembangunan infrastruktur difokuskan pada penyelesaian kebutuhan dasar kedua kawasan investasi prioritas. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan dampak yang cepat terhadap peningkatan daya tarik investasi sekaligus menciptakan fondasi bagi pengembangan industri dalam jangka menengah.

Tabel 3.13 Prioritas Infrastruktur Tahun 2027

Infrastruktur	KEK Arun	KIA Aceh Besar	Target 2027
Jalan akses kawasan	✓	✓	Peningkatan ruas prioritas
Listrik industri	✓	✓	Keandalan pasokan meningkat
Air baku	✓	✓	Sistem penyediaan beroperasi
Internet berkecepatan tinggi	✓	✓	100% kawasan terlayani
Kawasan logistik	✓	✓	Tahap awal pengembangan
Masterplan kawasan	✓	✓	Dokumen selesai
KPBU Infrastruktur	✓	✓	Proyek siap ditawarkan



Gambar 2. Peta Prioritas Infrastruktur Pendukung Investasi Aceh

3.5 Prioritas V: Penguatan SDM Investasi

A. Narasi Pengantar

Keberhasilan reformasi iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, pelayanan, maupun infrastruktur, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelola seluruh proses investasi. Aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas pada bidang pelayanan dan promosi investasi, merupakan garda terdepan dalam membangun kepercayaan investor melalui pelayanan yang profesional, responsif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*).

Hasil Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026 menunjukkan bahwa penguatan kompetensi aparatur masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Tantangan yang dihadapi meliputi belum meratanya kompetensi teknis pelayanan investasi, keterbatasan kemampuan komunikasi bisnis internasional, rendahnya pemahaman mengenai negosiasi investasi, serta belum tersedianya jalur pengembangan kompetensi yang terstruktur bagi aparatur pelayanan investasi.

Dalam praktik internasional, lembaga promosi investasi yang berhasil menempatkan pengembangan **Investment Human Capital** sebagai salah satu prioritas utama. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pengembangan kompetensi strategis seperti penguasaan sistem digital, negosiasi bisnis, hubungan investor (*investor relations*), bahasa asing, analisis proyek investasi, serta kemampuan membangun jejaring dengan dunia usaha.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan sistem penguatan SDM investasi yang terintegrasi melalui pembentukan **Akademi Investasi Aceh**, penyelenggaraan sertifikasi profesi, pelatihan pelayanan berbasis OSS, peningkatan kemampuan negosiasi bisnis dan komunikasi internasasional, pembentukan **Investor Relation Officer (IRO)**, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri melalui program *Link and Match*. Upaya ini diharapkan mampu membentuk aparatur yang profesional, kompeten, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan pelayanan investasi yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Provinsi Aceh.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.14 Matriks 6.10 Action Plan Penguatan SDM Investasi

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Kompetensi SDM pelayanan investasi belum merata, belum tersedia jalur pengembangan kompetensi yang terstruktur, dan kapasitas komunikasi internasional masih terbatas.
Tujuan	Membangun SDM investasi yang profesional, adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan investasi sesuai standar nasional dan internasasional.
Sasaran	Terwujudnya Investment Human Capital yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, promosi, dan fasilitasi investasi.
Program Prioritas	Penguatan SDM Investasi

Komponen	Rencana Implementasi
Kegiatan Utama	Pembentukan Akademi Investasi Aceh. Sertifikasi kompetensi SDM investasi. Pelatihan OSS dan pelayanan digital. Pelatihan Business Negotiation. Pelatihan Bahasa Inggris untuk pelayanan investasi. Pembentukan Investor Relation Officer (IRO). Program Link and Match dengan dunia industri dan perguruan tinggi.
Leading Sector	DPMPTSP Aceh
Supporting Agency	BKPSDM Aceh, Bappeda Aceh, Perguruan Tinggi, KADIN Aceh, Kementerian Investasi/BKPM, BNSP/LSP, dunia usaha, asosiasi profesi.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2029
Output	Akademi Investasi Aceh terbentuk. Program sertifikasi berjalan. Petugas pelayanan memperoleh pelatihan OSS. Investor Relation Officer tersedia. Kemitraan Link and Match dengan industri terbentuk.
Outcome	Meningkatnya kompetensi SDM investasi, kualitas pelayanan, serta kepuasan investor terhadap pelayanan Pemerintah Aceh.
Indikator Kinerja (KPI)	500 SDM tersertifikasi. 100% petugas front office memiliki sertifikasi pelayanan investasi. Peningkatan indeks kepuasan investor. Terbentuknya Investor Relation Officer pada DPMPTSP Aceh. Minimal lima kerja sama Link and Match dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.
Potensi Risiko	Keterbatasan anggaran pelatihan, tingginya rotasi pegawai, rendahnya minat mengikuti sertifikasi, dan keterbatasan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
Strategi Mitigasi	Penyusunan peta kompetensi SDM, integrasi pelatihan ke dalam pengembangan ASN, kerja sama dengan BKPM, perguruan tinggi, BNSP, serta penyelenggaraan pelatihan secara hybrid dan berkelanjutan.

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Pembentukan Akademi Investasi Aceh

Akademi Investasi Aceh dirancang sebagai pusat pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan investasi. Akademi ini menyelenggarakan pelatihan secara berjenjang mulai dari kompetensi dasar pelayanan investasi hingga pengembangan keahlian dalam analisis proyek, promosi investasi, negosiasi bisnis, dan pengelolaan hubungan investor.

Selain menjadi pusat pelatihan, Akademi Investasi Aceh diharapkan menjadi wadah pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) yang mampu menghasilkan SDM investasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

2. Sertifikasi Kompetensi SDM Investasi

Peningkatan kompetensi perlu didukung dengan sistem sertifikasi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional. Sertifikasi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa aparatur memiliki kompetensi yang terukur dalam pelayanan, fasilitasi, promosi, dan pengelolaan investasi. Program ini diprioritaskan bagi petugas pelayanan investasi, pejabat fungsional, dan aparatur yang berinteraksi langsung dengan investor.

3. Pelatihan OSS dan Pelayanan Digital

Transformasi pelayanan investasi memerlukan penguasaan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan sistem OSS dan aplikasi pelayanan investasi lainnya. Oleh karena itu, pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem digital, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, serta menyelesaikan permasalahan pelayanan secara cepat dan tepat.

4. Pelatihan Business Negotiation dan Bahasa Inggris

Dalam menghadapi investor nasional maupun internasional, aparatur perlu memiliki kemampuan negosiasi bisnis, komunikasi lintas budaya, serta penguasaan Bahasa Inggris. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mempresentasikan peluang investasi, melakukan *business matching*, serta membangun hubungan profesional dengan investor asing.

5. Pembentukan Investor Relation Officer (IRO)

Pemerintah Aceh perlu membentuk **Investor Relation Officer (IRO)** sebagai penghubung utama antara pemerintah dan investor. IRO bertugas memberikan informasi investasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan, mengawal proses investasi (*aftercare services*), serta menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan investor. Kehadiran IRO akan meningkatkan kualitas layanan pasca-investasi dan memperkuat kepercayaan investor terhadap Pemerintah Aceh.

6. Program Link and Match dengan Dunia Industri

Penguatan SDM investasi juga memerlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Program *Link and Match* diarahkan pada penyelarasan kurikulum, penyelenggaraan magang, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan talenta yang sesuai dengan sektor unggulan Aceh seperti agroindustri, energi, industri halal, logistik, dan ekonomi digital.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan penguatan SDM investasi ditentukan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut.

1. **Komitmen pemerintah daerah** dalam menjadikan pengembangan SDM sebagai bagian integral dari reformasi investasi.
2. **Sistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan**, mulai dari pelatihan dasar hingga sertifikasi profesi.

3. **Kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, BKPM, dan lembaga sertifikasi** untuk memastikan materi pelatihan relevan dengan kebutuhan investasi.
4. **Penerapan sistem insentif berbasis kompetensi**, sehingga aparatur terdorong untuk meningkatkan kapasitasnya secara berkelanjutan.
5. **Budaya pelayanan yang berorientasi pada investor**, dengan menempatkan profesionalisme, integritas, dan responsivitas sebagai nilai utama dalam pelayanan publik.

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Penguatan SDM investasi pada tahun pertama difokuskan pada pembentukan sistem pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, serta pembentukan fungsi hubungan investor yang profesional.

Tabel 3.15: Quick Wins Penguatan SDM Investasi Tahun 2027

No	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Pembentukan **Akademi Investasi Aceh**	Akademi mulai beroperasi	DPMPTSP, BKPSDM	Program pelatihan perdana terlaksana
2	Sertifikasi SDM pelayanan investasi	Minimal 200 aparatur tersertifikasi	DPMPTSP, LSP/BNSP	Sertifikat kompetensi diterbitkan
3	Pelatihan OSS dan pelayanan digital	Seluruh petugas front office mengikuti pelatihan	DPMPTSP	100% petugas dilatih
4	Pelatihan Business Negotiation dan Bahasa Inggris	Minimal dua angkatan pelatihan	DPMPTSP, Perguruan Tinggi	Kompetensi komunikasi meningkat
5	Pembentukan **Investor Relation Officer (IRO)**	Tim IRO dibentuk dan mulai beroperasi	DPMPTSP	Investor memperoleh layanan pendampingan
6	Program Link and Match	Penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri	DPMPTSP, Perguruan Tinggi, KADIN	Minimal tiga nota kesepahaman ditandatangani

F. Expected Early Results (Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027)

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas pelayanan investasi sebagai fondasi bagi pengembangan *Investment Human Capital* yang berkelanjutan.

Tabel 3.16 Expected Early Results Penguatan SDM Investasi Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Akademi Investasi Aceh	Beroperasi
SDM tersertifikasi	≥200 orang
Petugas front office tersertifikasi	100%
Investor Relation Officer (IRO)	Berfungsi pada DPMPTSP Aceh
Kerja sama Link and Match	≥3 kemitraan
Tingkat kepuasan investor terhadap layanan	≥90%
Nilai Dimensi SDM pada Indeks Iklim Investasi Aceh	Meningkat dibanding tahun dasar 2026

G. Roadmap Pengembangan *Investment Human Capital* 2027–2030

Untuk memperjelas tahapan implementasi, bagian ini dapat ditutup dengan peta jalan pengembangan SDM investasi.

Tahun	Fokus Pengembangan	Target Utama
2027	Membangun fondasi	Akademi Investasi, sertifikasi awal, IRO terbentuk
2028	Penguatan kapasitas	Perluasan sertifikasi, peningkatan kompetensi negosiasi dan digital, kemitraan industri
2029	Integrasi	Seluruh OPD terkait memiliki SDM investasi tersertifikasi dan sistem pembelajaran berkelanjutan
2030	Keunggulan	Terwujud *Investment Human Capital* yang profesional, berstandar nasional, dan mampu mendukung daya saing investasi Aceh

Dengan tambahan roadmap ini, Prioritas V tidak hanya menghasilkan target **500 SDM tersertifikasi**, tetapi juga menggambarkan proses transformasi kelembagaan menuju terbentuknya ekosistem SDM investasi yang profesional dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan tema besar Bab 6, yaitu mengubah rekomendasi kebijakan menjadi rencana implementasi yang terukur hingga tahun 2030.

3.6 Prioritas VI: Percepatan Hilirisasi Industri

A. Narasi Pengantar

Perekonomian Aceh masih ditopang oleh berbagai komoditas primer yang memiliki daya saing tinggi, antara lain Kopi Gayo, nilam, kelapa sawit, hasil perikanan, dan kakao. Namun demikian, sebagian besar komoditas tersebut masih diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah atau produk dengan tingkat pengolahan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan penerimaan daerah belum dapat dinikmati secara optimal di dalam wilayah Aceh.

Percepatan hilirisasi industri menjadi instrumen strategis untuk mengubah struktur ekonomi Aceh dari ketergantungan pada produksi komoditas primer menuju ekonomi berbasis pengolahan, inovasi, dan penciptaan nilai tambah. Hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan pabrik pengolahan, tetapi mencakup penguatan seluruh rantai nilai, mulai dari penyediaan bahan baku, standardisasi kualitas, teknologi produksi, pengemasan, sertifikasi, logistik, pemasaran, hingga akses ekspor.

Dalam konteks investasi, hilirisasi memberikan peluang untuk menarik investor pada sektor industri pengolahan yang memiliki keterkaitan langsung dengan basis produksi lokal. Pengembangan industri kopi spesialti, minyak atsiri, pengolahan kelapa sawit, perikanan terpadu, serta industri cokelat dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan sekaligus mengurangi ketergantungan Aceh pada perdagangan bahan mentah.

Agenda percepatan hilirisasi industri diarahkan pada pembentukan klaster industri berbasis komoditas unggulan, penyusunan proyek investasi siap ditawarkan, penguatan kemitraan antara produsen dan industri, penyediaan infrastruktur pengolahan, peningkatan standar mutu, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional. Melalui pendekatan tersebut, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan jumlah industri pengolahan, memperbesar ekspor produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Aceh.

B. Matriks Action Plan

Tabel 3.17 Matriks 6.13 Action Plan Percepatan Hilirisasi Industri

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Komoditas unggulan Aceh masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau produk setengah jadi sehingga nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi daerah belum optimal.
Tujuan	Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan melalui pengembangan industri pengolahan yang terintegrasi, kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.
Sasaran	Terbentuknya klaster hilirisasi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan investasi industri, kapasitas pengolahan, ekspor produk olahan, dan pendapatan masyarakat.
Program Prioritas	Percepatan Hilirisasi Industri
Kegiatan Utama	Penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Industri Aceh. Pengembangan klaster industri Kopi Gayo. Pengembangan industri minyak atsiri berbasis nilam. Pengembangan industri pengolahan dan turunan kelapa sawit. Pengembangan sistem rantai dingin dan pengolahan hasil perikanan. Pengembangan industri kakao dan cokelat. Penyusunan proyek hilirisasi siap investasi. Penguatan kemitraan produsen, koperasi, UMKM, dan industri besar. Fasilitasi sertifikasi mutu, halal, keamanan pangan, dan ekspor.
Leading Sector	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Komponen	Rencana Implementasi
Supporting Agency	DPMPTSP Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Pangan Aceh, perguruan tinggi, KADIN, perbankan, koperasi produsen, asosiasi komoditas, dan pelaku industri.
Lokasi Prioritas	Sentra produksi komoditas unggulan, KEK Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh di Aceh Besar, serta kawasan pengolahan yang terhubung dengan pelabuhan dan pusat logistik.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2030
Output	Peta Jalan Hilirisasi Industri Aceh tersedia. Klaster industri berbasis komoditas terbentuk. Proyek hilirisasi siap investasi tersusun. Fasilitas pengolahan dan rantai dingin bertambah. Kemitraan antara produsen dan industri meningkat. Produk olahan memperoleh sertifikasi dan akses pasar.
Outcome	Bertambahnya industri pengolahan, meningkatnya ekspor produk olahan, naiknya nilai tambah daerah, serta bertambahnya kesempatan kerja pada sektor industri.
Indikator Kinerja Utama	Pertumbuhan jumlah industri pengolahan. Peningkatan volume dan nilai ekspor produk olahan. Peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB. Peningkatan proporsi komoditas yang diolah di Aceh. Peningkatan penyerapan tenaga kerja industri.
Potensi Risiko	Ketidakstabilan pasokan bahan baku, keterbatasan teknologi, lemahnya kemitraan antara produsen dan industri, keterbatasan pembiayaan, ketidaksesuaian standar mutu, serta fluktuasi pasar global.
Strategi Mitigasi	Penguatan kontrak pasokan bahan baku, pengembangan kemitraan inti-plasma, fasilitasi pembiayaan, alih teknologi, pendampingan sertifikasi, diversifikasi pasar, dan penguatan sistem informasi komoditas.

C. Fokus Hilirisasi Komoditas Unggulan

Tabel 3.18 Arah Hilirisasi Komoditas Unggulan Aceh

Komoditas	Arah Hilirisasi	Produk Turunan Prioritas	Dampak yang Diharapkan
Kopi Gayo	*Specialty Coffee Industry*	Kopi sangrai, kopi bubuk premium, kapsul kopi, ekstrak kopi, produk siap minum	Peningkatan harga jual, penguatan merek daerah, dan perluasan pasar ekspor
Nilam	*Essential Oil Industry*	Minyak nilam murni, fraksinasi minyak atsiri, parfum, kosmetik, aromaterapi	Peningkatan nilai tambah, standardisasi mutu, dan penguatan industri minyak atsiri
Kelapa Sawit	*Palm Oil Refinery*	Minyak goreng, olein, stearin, biodiesel, oleokimia, bahan baku kosmetik	Pengurangan ekspor bahan mentah dan peningkatan investasi industri pengolahan

Komoditas	Arah Hilirisasi	Produk Turunan Prioritas	Dampak yang Diharapkan
Perikanan	*Cold Storage and Processing Industry*	Ikan beku, fillet, produk kaleng, surimi, tepung ikan, produk siap saji	Pengurangan kehilangan hasil, peningkatan kualitas ekspor, dan stabilisasi harga
Kakao	*Chocolate Industry*	Biji kakao fermentasi, bubuk kakao, cocoa butter, cokelat batang, produk konfeksioneri	Peningkatan nilai jual, pengembangan merek lokal, dan pertumbuhan industri pangan

D. Elaborasi Program Prioritas

1. Pengembangan *Specialty Coffee Industry* Kopi Gayo

Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas unggulan Aceh yang telah memiliki reputasi kuat di pasar internasional. Namun, sebagian besar nilai ekonomi masih berasal dari penjualan biji kopi, sementara kegiatan pengolahan lanjutan, pengembangan merek, pengemasan, dan pemasaran produk akhir masih terbatas.

Program hilirisasi Kopi Gayo diarahkan pada pengembangan industri penyangraian, penggilingan, ekstraksi, pengemasan premium, dan produk siap konsumsi. Penguatan hilirisasi juga perlu disertai dengan perlindungan indikasi geografis, ketertelusuran produk, sertifikasi organik, standardisasi kualitas, serta promosi merek regional.

Pemerintah Aceh perlu mendorong kemitraan antara koperasi petani, pelaku usaha lokal, eksportir, perguruan tinggi, dan investor untuk membangun rantai nilai kopi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, Aceh tidak hanya dikenal sebagai penghasil biji kopi berkualitas, tetapi juga sebagai pusat industri kopi spesialti.

2. Pengembangan Industri Minyak Atsiri Berbasis Nilam

Nilam Aceh memiliki keunggulan kualitas dan kandungan minyak yang tinggi. Akan tetapi, perdagangan nilam masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga, lemahnya standardisasi, keterbatasan teknologi penyulingan, dan rendahnya pengolahan produk turunan.

Hilirisasi nilam diarahkan pada pengembangan industri minyak atsiri yang mencakup penyulingan modern, pemurnian, fraksinasi, formulasi produk, dan pengembangan bahan baku bagi industri parfum, kosmetik, farmasi, dan aromaterapi. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan teknologi penyulingan, laboratorium mutu, standardisasi produk, serta kerja sama dengan industri pengguna.

Pengembangan klaster nilam yang terintegrasi akan meningkatkan posisi tawar petani, menciptakan stabilitas pasokan, dan memperbesar peluang Aceh memasuki rantai pasok industri minyak atsiri global.

3. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah. Namun, struktur industri masih banyak bertumpu pada produk primer dan

pengolahan awal. Oleh karena itu, percepatan hilirisasi diarahkan pada pembangunan industri pemurnian minyak sawit, pengembangan biodiesel, oleokimia, bahan baku kosmetik, dan produk turunan lainnya.

Pengembangan industri sawit perlu didorong pada kawasan yang memiliki akses terhadap bahan baku, energi, pelabuhan, dan jaringan logistik, khususnya pada koridor KEK Arun Lhokseumawe dan kawasan industri lainnya. Investasi pada sektor ini harus disertai dengan penerapan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, pemanfaatan limbah, dan perlindungan lingkungan.

4. Pengembangan Rantai Dingin dan Industri Pengolahan Perikanan

Sektor perikanan Aceh memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Ketiadaan rantai dingin yang memadai menyebabkan kehilangan hasil, penurunan kualitas, dan lemahnya daya tawar nelayan.

Program hilirisasi perikanan diarahkan pada pengembangan fasilitas *cold storage*, pabrik es, unit pembekuan, pengolahan fillet, pengalengan, pengemasan, serta produksi berbagai produk siap konsumsi. Pengembangan fasilitas ini harus terintegrasi dengan pelabuhan perikanan, sentra produksi, kawasan industri, dan jalur ekspor.

Penguatan standardisasi keamanan pangan, sertifikasi mutu, dan ketertelusuran produk menjadi prasyarat untuk memperluas akses ke pasar ekspor.

5. Pengembangan Industri Kakao dan Cokelat

Kakao memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi industri pangan bernilai tambah. Hilirisasi kakao diarahkan pada peningkatan kualitas fermentasi, pengolahan bubuk kakao, produksi lemak kakao, cokelat batang, minuman cokelat, dan produk konfeksioneri.

Pengembangan industri cokelat perlu disertai dengan peningkatan produktivitas kebun, peremajaan tanaman, penguatan koperasi, peningkatan teknologi pascapanen, dan pembangunan merek lokal. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri diperlukan untuk menghasilkan produk yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan preferensi pasar.

6. Penyusunan Proyek Hilirisasi Siap Investasi

Setiap komoditas prioritas perlu diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan. Dokumen proyek harus memuat informasi mengenai ketersediaan bahan baku, lokasi, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, teknologi, kebutuhan investasi, proyeksi pasar, skema kemitraan, potensi keuntungan, serta risiko proyek.

Proyek-proyek tersebut perlu dimasukkan ke dalam **Aceh Investment Portal**, *Digital Investment Catalogue*, dan portofolio IPRO agar dapat dipromosikan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri.

7. Penguatan Kemitraan Rantai Nilai

Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada keterhubungan antara petani, nelayan, koperasi, UMKM, industri pengolahan, eksportir, dan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu mendorong pola kemitraan yang menjamin pasokan bahan baku, kualitas produk, kepastian harga, transfer teknologi, dan pembagian manfaat yang adil.

Skema kemitraan dapat dikembangkan melalui kontrak pembelian, koperasi pemasok, model inti-plasma, pembiayaan rantai pasok, serta kemitraan antara industri besar dan UMKM lokal.

E. Critical Success Factors

Keberhasilan percepatan hilirisasi industri ditentukan oleh beberapa faktor utama.

1. **Kepastian dan kontinuitas bahan baku**, baik dari sisi volume, kualitas, maupun jadwal pasokan.
2. **Ketersediaan infrastruktur industri**, termasuk listrik, air baku, jalan, pelabuhan, pergudangan, dan konektivitas digital.
3. **Ketersediaan teknologi pengolahan** yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan standar pasar nasional dan internasional.
4. **Akses terhadap pembiayaan**, terutama untuk pembangunan fasilitas pengolahan, modernisasi mesin, sertifikasi, dan modal kerja.
5. **Kemitraan antara produsen dan industri**, sehingga hilirisasi memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM.
6. **Pemenuhan standar mutu dan sertifikasi**, seperti sertifikasi halal, keamanan pangan, keberlanjutan, dan persyaratan ekspor.
7. **Kepastian pasar**, melalui kontrak pembelian, promosi dagang, diversifikasi pasar, dan penguatan merek produk Aceh.
8. **Koordinasi lintas sektor**, khususnya antara perangkat daerah yang menangani investasi, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan infrastruktur.

F. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Pelaksanaan hilirisasi pada tahun pertama difokuskan pada penyusunan fondasi kebijakan, pemetaan rantai nilai, pengembangan proyek siap investasi, dan percepatan sejumlah fasilitas pengolahan yang dapat segera memberikan dampak ekonomi.

Tabel 3.19 Quick Wins Percepatan Hilirisasi Industri Tahun 2027

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Penyusunan **Peta Jalan Hilirisasi Industri Aceh 2027–2030**	Dokumen selesai dan ditetapkan	Disperindag, Bappeda	Peta jalan menjadi acuan program dan penganggaran
2	Penyusunan profil rantai nilai lima komoditas unggulan	Kopi, nilam, sawit, perikanan, dan kakao selesai dipetakan	Disperindag, OPD Teknis	Lima dokumen analisis rantai nilai tersedia

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
3	Penyusunan proyek hilirisasi siap investasi	Minimal 10 proyek selesai disusun	DPMPTSP, Disperindag	Proyek masuk dalam katalog investasi dan IPRO
4	Pembentukan forum koordinasi hilirisasi	Forum lintas OPD dan dunia usaha terbentuk	Sekretariat Daerah, Bappeda	Forum melaksanakan koordinasi secara berkala
5	Fasilitasi sertifikasi produk olahan	Minimal 25 produk memperoleh sertifikasi	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Sertifikat mutu, halal, atau keamanan pangan diterbitkan
6	Penguatan fasilitas *cold storage* dan pengolahan perikanan	Fasilitas prioritas mulai dibangun atau direvitalisasi	DKP Aceh	Kapasitas penyimpanan dan pengolahan meningkat
7	Program kemitraan industri dan produsen	Minimal lima kemitraan terbentuk	Disperindag, KADIN, koperasi	Perjanjian kerja sama atau kontrak pasokan ditandatangani
8	Promosi investasi hilirisasi	Proyek prioritas dipromosikan kepada investor	DPMPTSP	Minimal lima investor melakukan penjajakan

G. Expected Early Results

Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri pengolahan, meningkatnya kesiapan proyek, serta terbentuknya kemitraan awal antara produsen, industri, dan investor.

Tabel 3.20 Expected Early Results Percepatan Hilirisasi Industri Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Peta Jalan Hilirisasi Industri Aceh	1 dokumen ditetapkan
Komoditas yang telah memiliki analisis rantai nilai	5 komoditas
Proyek hilirisasi siap investasi	≥10 proyek
Investor potensial sektor hilirisasi	≥5 investor
Produk olahan yang memperoleh sertifikasi	≥25 produk
Kemitraan produsen–industri	≥5 kemitraan
Fasilitas pengolahan atau rantai dingin yang dikembangkan	Minimal 2 fasilitas
Industri pengolahan baru atau yang melakukan ekspansi	Minimal 3 unit usaha

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Nilai ekspor produk olahan	Mulai menunjukkan peningkatan dibanding tahun dasar 2026
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Menunjukkan tren peningkatan

H. Roadmap Hilirisasi Industri Aceh 2027–2030

Tabel 3.21 Tahapan Percepatan Hilirisasi Industri

Tahun	Fokus Pengembangan	Target Utama
2027	Pembangunan fondasi	Peta jalan ditetapkan, rantai nilai dipetakan, proyek siap investasi disusun, dan kemitraan awal terbentuk
2028	Pengembangan fasilitas	Fasilitas pengolahan, logistik, dan rantai dingin mulai beroperasi; investasi industri mulai direalisasikan
2029	Perluasan skala produksi	Kapasitas industri meningkat, produk olahan bertambah, dan pasar ekspor diperluas
2030	Penguatan daya saing	Terbentuk klaster hilirisasi yang terintegrasi, berdaya saing, dan berorientasi ekspor

I. Kerangka Klaster Hilirisasi Berbasis Kawasan

Untuk memperkuat keterkaitan antara hilirisasi dan pengembangan wilayah, proyek industri pengolahan perlu diarahkan pada lokasi yang memiliki keunggulan bahan baku, infrastruktur, pasar, dan jaringan logistik.

Tabel 3.22 Arah Pengembangan Klaster Hilirisasi

Klaster	Basis Komoditas	Lokasi Pengembangan	Infrastruktur Pendukung
Klaster Industri Utara Aceh	Sawit, energi, petrokimia, perikanan	KEK Arun Lhokseumawe dan koridor utara Aceh	Pelabuhan, listrik industri, jaringan gas, jalan logistik, pergudangan
Klaster Industri Banda Aceh–Aceh Besar	Agroindustri, pangan, industri halal, kakao, logistik	KIA Aceh Besar	Pelabuhan Malahayati, Bandara Sultan Iskandar Muda, listrik, air baku, internet
Klaster Kopi Dataran Tinggi Gayo	Kopi Arabika Gayo	Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues	Jalan produksi, pusat pengolahan, laboratorium mutu, logistik
Klaster Nilam	Nilam dan minyak atsiri	Sentra produksi nilam di wilayah barat, selatan, dan tengah Aceh	Unit penyulingan, laboratorium, pergudangan, pusat distribusi

Klaster	Basis Komoditas	Lokasi Pengembangan	Infrastruktur Pendukung
Klaster Perikanan Pesisir	Perikanan tangkap dan budidaya	Wilayah pesisir timur, utara, barat, dan selatan Aceh	Pelabuhan perikanan, *cold storage*, pabrik es, fasilitas pengolahan

Melalui pendekatan tersebut, hilirisasi industri tidak hanya diarahkan pada pembangunan unit pengolahan secara terpisah, tetapi pada pembentukan **ekosistem industri berbasis kawasan dan rantai nilai**. Keberhasilan Prioritas VI pada akhirnya harus diukur dari seberapa besar komoditas Aceh dapat diolah di dalam daerah, seberapa banyak produk bernilai tambah yang dipasarkan, serta seberapa luas manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat, produsen lokal, dan pemerintah daerah.

3.7 Prioritas VII: Pengembangan *Green Investment*

Perubahan orientasi investasi global menunjukkan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Investor tidak lagi hanya menilai tingkat keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, keberlanjutan sosial, tata kelola perusahaan, efisiensi sumber daya, dan ketahanan proyek terhadap risiko perubahan iklim.

Bagi Aceh, perkembangan tersebut tidak semata-mata menjadi tantangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Aceh memiliki potensi besar pada sektor energi terbarukan, kehutanan, kelautan, pertanian berkelanjutan, konservasi karbon, ekonomi sirkular, dan ekonomi biru. Apabila dikembangkan dengan kerangka kebijakan yang tepat, potensi tersebut dapat menarik investasi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan *green investment* diarahkan untuk membangun ekosistem investasi yang mampu mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh tahapan investasi, mulai dari perencanaan proyek, promosi, pemberian insentif, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dampak. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari daya saing investasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

Agenda utama mencakup penyusunan **ESG Guideline Aceh**, pengembangan skema pembiayaan hijau, penyusunan proyek karbon, percepatan investasi energi terbarukan, pengembangan ekonomi sirkular, serta pemanfaatan potensi kelautan melalui konsep ekonomi biru. Melalui pendekatan tersebut, Aceh diharapkan mampu membangun identitas sebagai wilayah tujuan investasi yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

A. Matriks Action Plan

Tabel 3.23 Matriks 6.19 Action Plan Pengembangan *Green Investment*

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Potensi investasi hijau Aceh belum dikembangkan secara terstruktur, standar ESG belum terintegrasi dalam kebijakan investasi, dan akses terhadap pembiayaan hijau masih terbatas.

Komponen	Rencana Implementasi
Tujuan	Membangun ekosistem investasi hijau yang mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola serta mendorong pembiayaan bagi proyek berkelanjutan.
Sasaran	Terwujudnya peningkatan jumlah proyek investasi yang memenuhi standar ESG, bertambahnya proyek energi terbarukan, dan meningkatnya pembiayaan hijau.
Program Prioritas	Pengembangan *Green Investment*
Kegiatan Utama	Penyusunan **ESG Guideline Aceh**. Pembentukan portofolio proyek investasi hijau. Pengembangan skema *green financing*. Penyusunan proyek karbon. Pengembangan energi terbarukan. Pengembangan ekonomi sirkular. Pengembangan ekonomi biru. Penerapan insentif bagi proyek investasi hijau. Penyusunan sistem pemantauan ESG.
Leading Sector	Bappeda Aceh dan DPMPTSP Aceh
Supporting Agency	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, BPKA, perbankan, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, KADIN, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Lokasi Prioritas	Kawasan industri prioritas, wilayah potensi energi terbarukan, kawasan pesisir dan kelautan, sentra pengolahan limbah, kawasan konservasi, serta wilayah dengan potensi proyek karbon.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2030
Output	ESG Guideline Aceh ditetapkan. Portofolio proyek hijau tersedia. Skema pembiayaan hijau dikembangkan. Proyek karbon disiapkan. Proyek energi terbarukan bertambah. Model ekonomi sirkular dan ekonomi biru dikembangkan. Sistem pemantauan ESG tersedia.
Outcome	Meningkatnya proporsi investasi yang memenuhi standar ESG, bertambahnya investasi energi hijau, meningkatnya pembiayaan berkelanjutan, dan menguatnya citra Aceh sebagai destinasi investasi hijau.
Indikator Kinerja Utama	Minimal 20% investasi baru memenuhi standar ESG. Bertambahnya jumlah proyek energi terbarukan. Meningkatnya nilai pembiayaan hijau. Bertambahnya proyek karbon dan ekonomi sirkular. Meningkatnya nilai Dimensi Keberlanjutan pada Indeks Iklim Investasi Aceh.
Potensi Risiko	Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap ESG, keterbatasan proyek yang memenuhi kelayakan hijau, biaya awal yang tinggi, belum

Komponen	Rencana Implementasi
	seragamnya metodologi pengukuran dampak, dan keterbatasan akses pembiayaan.
Strategi Mitigasi	Penyusunan pedoman yang sederhana dan terukur, pendampingan proyek, kerja sama dengan lembaga pembiayaan, penyediaan insentif, penguatan sistem verifikasi, dan pembangunan kapasitas pelaku usaha.

B. Fokus Pengembangan *Green Investment*

Tabel 3.24 Pilar Pengembangan Investasi Hijau Aceh

Pilar	Arah Pengembangan	Contoh Program atau Proyek	Dampak yang Diharapkan
ESG Guideline	Integrasi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam proses investasi	Panduan ESG, klasifikasi proyek hijau, sistem penilaian ESG	Meningkatnya kualitas dan kredibilitas proyek investasi
Green Financing	Peningkatan akses pembiayaan proyek berkelanjutan	Kredit hijau, pembiayaan syariah hijau, obligasi hijau daerah, dana campuran	Bertambahnya sumber pembiayaan investasi hijau
Carbon Project	Pengembangan proyek pengurangan dan penyerapan emisi	Restorasi hutan, konservasi mangrove, rehabilitasi lahan, pengelolaan gambut	Pembiayaan konservasi dan peningkatan nilai ekonomi karbon
Renewable Energy	Pemanfaatan sumber energi bersih	Tenaga air, surya, biomassa, biogas, panas bumi	Diversifikasi energi dan pengurangan emisi
Circular Economy	Pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya	Daur ulang, pemanfaatan limbah sawit, pengolahan sampah, industri berbasis residu	Efisiensi sumber daya dan pengurangan beban lingkungan
Blue Economy	Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	Perikanan berkelanjutan, budidaya laut, energi laut, wisata bahari, konservasi pesisir	Pertumbuhan ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Penyusunan ESG Guideline Aceh

Pemerintah Aceh perlu menyusun **ESG Guideline Aceh** sebagai acuan bagi perangkat daerah, investor, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha dalam mengembangkan investasi berkelanjutan. Pedoman tersebut perlu memuat kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat diterapkan secara proporsional sesuai skala dan karakteristik proyek.

Aspek lingkungan mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan air, pengendalian emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim. Aspek sosial meliputi perlindungan tenaga kerja, keterlibatan masyarakat, kesetaraan akses, keselamatan kerja, dan distribusi manfaat ekonomi. Sementara itu, aspek tata kelola mencakup transparansi, integritas, kepatuhan, manajemen risiko, dan mekanisme pengaduan.

Pedoman ESG perlu diintegrasikan ke dalam proses promosi investasi, penyusunan IPRO, pemberian insentif, evaluasi proyek, dan layanan pasca-investasi.

2. Pengembangan *Green Financing*

Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan proyek hijau. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu memfasilitasi pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek berkelanjutan.

Pembiayaan dapat dikembangkan melalui kredit hijau perbankan, pembiayaan syariah, skema *blended finance*, pembiayaan berbasis hasil, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan pembangunan. Untuk proyek berskala besar, Pemerintah Aceh juga dapat mengembangkan skema pembiayaan kreatif melalui KPBU hijau atau instrumen pembiayaan daerah yang relevan.

Setiap proyek hijau perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, indikator dampak, rencana mitigasi lingkungan, dan model bisnis yang kredibel agar dapat memenuhi persyaratan lembaga pembiayaan.

3. Pengembangan Proyek Karbon

Potensi hutan, lahan, mangrove, dan ekosistem pesisir Aceh memberikan peluang untuk pengembangan proyek karbon. Proyek tersebut dapat diarahkan pada konservasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, restorasi mangrove, pengelolaan gambut, pengurangan emisi industri, dan peningkatan serapan karbon.

Pengembangan proyek karbon harus didukung oleh basis data yang akurat, kepastian status lahan, metode pengukuran yang dapat diverifikasi, sistem pelaporan, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek karbon tidak menimbulkan konflik lahan atau mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya.

Proyek karbon yang kredibel dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi konservasi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

4. Percepatan Investasi Energi Terbarukan

Aceh memiliki potensi pengembangan energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, industri, dan kawasan investasi. Pengembangan energi bersih perlu diarahkan pada sumber yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah, seperti tenaga air, energi surya, biomassa, biogas, dan potensi panas bumi.

Program prioritas mencakup pemetaan potensi energi, penyusunan proyek siap investasi, penyederhanaan proses fasilitasi, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pengembangan skema pembelian energi. Pengembangan energi terbarukan pada kawasan industri juga dapat memperkuat daya tarik Aceh bagi investor yang memiliki komitmen dekarbonisasi.

5. Pengembangan Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular mendorong penggunaan sumber daya secara efisien melalui pengurangan, penggunaan kembali, pengolahan, dan pemanfaatan limbah sebagai bahan baku baru. Pendekatan ini relevan bagi sektor perkebunan, perikanan, industri pangan, konstruksi, dan pengelolaan sampah.

Program ekonomi sirkular dapat mencakup pemanfaatan limbah sawit untuk energi dan pupuk, pengolahan limbah perikanan menjadi tepung ikan, pemanfaatan sisa pertanian sebagai biomassa, daur ulang kemasan, serta pengembangan industri berbasis material sekunder.

Pemerintah Aceh perlu mendorong terbentuknya kemitraan antara produsen limbah, industri pengolah, UMKM, lembaga riset, dan investor agar terbentuk ekosistem usaha yang produktif dan rendah limbah.

6. Pengembangan Ekonomi Biru

Potensi kelautan Aceh perlu dikembangkan melalui pendekatan ekonomi biru yang menggabungkan produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program dapat diarahkan pada perikanan tangkap berkelanjutan, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, wisata bahari, konservasi pesisir, energi laut, dan bioteknologi kelautan.

Pengembangan ekonomi biru perlu disertai dengan pengendalian kapasitas produksi, ketertelusuran hasil perikanan, perlindungan habitat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kelembagaan nelayan dan koperasi pesisir.

7. Pemberian Insentif bagi Investasi Hijau

Untuk mempercepat pertumbuhan investasi hijau, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan mekanisme insentif yang proporsional dan berbasis kinerja. Insentif dapat diberikan kepada proyek yang memenuhi standar ESG, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, menciptakan lapangan kerja hijau, atau memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.

Insentif dapat berbentuk kemudahan pelayanan, pendampingan prioritas, dukungan promosi, fasilitasi lahan, pengurangan biaya tertentu sesuai kewenangan, atau akses terhadap skema pembiayaan. Setiap insentif harus diberikan berdasarkan indikator yang transparan dan dapat dievaluasi.

8. Sistem Pemantauan dan Pelaporan ESG

Pengembangan investasi hijau memerlukan sistem pemantauan yang mampu mengukur dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pemerintah Aceh perlu mengembangkan *dashboard* ESG yang memuat data proyek, nilai investasi, penggunaan energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, penyerapan tenaga kerja, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan tata kelola.

Pelaporan dilakukan secara berkala dan menjadi dasar evaluasi kebijakan, pemberian insentif, promosi proyek hijau, serta penyusunan Indeks Iklim Investasi Aceh.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan pengembangan *green investment* ditentukan oleh beberapa faktor utama.

1. **Ketersediaan kerangka kebijakan ESG** yang jelas, sederhana, terukur, dan dapat diterapkan oleh investor.
2. **Ketersediaan proyek hijau yang layak investasi**, didukung studi kelayakan, model bisnis, dan indikator dampak.
3. **Akses terhadap pembiayaan hijau**, baik melalui perbankan, pembiayaan syariah, lembaga pembangunan, maupun kemitraan swasta.
4. **Kualitas data lingkungan dan emisi**, terutama untuk pengembangan proyek energi, karbon, ekonomi sirkular, dan ekonomi biru.
5. **Kepastian tata ruang dan status lahan**, khususnya untuk proyek energi terbarukan, konservasi, dan karbon.
6. **Keterlibatan masyarakat lokal**, agar investasi hijau memberikan manfaat sosial dan mengurangi risiko konflik.
7. **Kapasitas kelembagaan**, termasuk kemampuan perangkat daerah dalam menilai, memantau, dan melaporkan kinerja ESG.
8. **Sistem insentif yang kredibel**, transparan, dan dikaitkan dengan capaian kinerja keberlanjutan.

E. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Pelaksanaan *green investment* pada tahun pertama difokuskan pada pembentukan kerangka kebijakan, identifikasi proyek prioritas, pembangunan kemitraan pembiayaan, dan penyiapan sistem pemantauan ESG.

Tabel 3.25 Quick Wins Pengembangan *Green Investment* Tahun 2027

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Penyusunan **ESG Guideline Aceh**	Pedoman selesai dan ditetapkan	Bappeda, DPMPTSP, DLHK	Pedoman digunakan dalam penilaian proyek investasi
2	Pemetaan proyek investasi hijau	Portofolio awal proyek tersedia	DPMPTSP, OPD Teknis	Minimal 15 proyek hijau teridentifikasi

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
3	Penyusunan proyek energi terbarukan siap investasi	Proyek prioritas masuk ke dalam IPRO	Dinas ESDM, DPMPTSP	Minimal 5 proyek siap ditawarkan
4	Penyusunan proyek karbon percontohan	Lokasi dan model proyek ditetapkan	DLHK, Bappeda	Minimal 2 proyek percontohan disiapkan
5	Pembentukan forum pembiayaan hijau Aceh	Forum pemerintah, perbankan, dan investor terbentuk	Bappeda, BPKA, perbankan	Forum melaksanakan pertemuan dan menghasilkan rencana pembiayaan
6	Pilot project ekonomi sirkular	Proyek percontohan mulai berjalan	Disperindag, DLHK	Minimal 3 proyek dilaksanakan
7	Pilot project ekonomi biru	Proyek prioritas pesisir atau kelautan disiapkan	DKP Aceh	Minimal 2 proyek dikembangkan
8	Penyusunan *dashboard* ESG	Sistem pemantauan awal tersedia	DPMPTSP, Diskominsa, DLHK	Data proyek hijau mulai dihimpun secara digital

G. Expected Early Results

Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan fondasi kebijakan, portofolio proyek, jejaring pembiayaan, dan sistem pemantauan yang mendukung percepatan investasi hijau pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.26 Expected Early Results Pengembangan *Green Investment* Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
ESG Guideline Aceh	1 dokumen ditetapkan
Proyek investasi hijau yang teridentifikasi	≥15 proyek
Proyek energi terbarukan siap investasi	≥5 proyek
Proyek karbon percontohan	≥2 proyek
Proyek ekonomi sirkular	≥3 proyek
Proyek ekonomi biru	≥2 proyek
Lembaga pembiayaan yang terlibat dalam forum pembiayaan hijau	≥5 lembaga
Nilai komitmen awal pembiayaan hijau	Menunjukkan pertumbuhan dibanding tahun dasar 2026
Proporsi investasi baru yang mulai menerapkan kriteria ESG	≥10%
Sistem pemantauan ESG	Beroperasi pada tahap awal

G. Roadmap Pengembangan *Green Investment* 2027–2030

Tabel 3.27 Tahapan Pengembangan Investasi Hijau

Tahun	Fokus Pengembangan	Target Utama
2027	Pembangunan fondasi	ESG Guideline ditetapkan, proyek hijau dipetakan, forum pembiayaan terbentuk, dan proyek percontohan dimulai
2028	Pengembangan proyek	Proyek energi terbarukan, karbon, ekonomi sirkular, dan ekonomi biru memasuki tahap transaksi atau konstruksi
2029	Perluasan skala	Pembiayaan hijau meningkat, proyek ESG bertambah, dan sistem pemantauan diterapkan lintas sektor
2030	Penguatan daya saing hijau	Minimal 20% investasi baru memenuhi standar ESG dan Aceh dikenal sebagai destinasi investasi berkelanjutan

I. Kerangka Integrasi ESG dalam Siklus Investasi

Agar prinsip ESG tidak berhenti sebagai dokumen normatif, penerapannya perlu diintegrasikan ke dalam seluruh siklus investasi.

Tabel 3.28 Integrasi ESG dalam Siklus Investasi Aceh

Tahap Investasi	Integrasi ESG	Instrumen
Identifikasi peluang	Penyaringan potensi dampak lingkungan dan sosial	*ESG screening checklist*
Penyusunan proyek	Integrasi indikator ESG dalam studi kelayakan	Dokumen IPRO hijau
Promosi investasi	Penonjolan manfaat lingkungan dan sosial	*Green investment catalogue*
Fasilitasi dan perizinan	Verifikasi kepatuhan dan rencana mitigasi	Formulir penilaian ESG
Pembiayaan	Penilaian kelayakan hijau dan dampak proyek	*Green financing assessment*
Pelaksanaan	Pemantauan emisi, limbah, tenaga kerja, dan manfaat sosial	*Dashboard* ESG
Layanan pasca-investasi	Evaluasi, pendampingan, dan perbaikan kinerja	Laporan keberlanjutan
Pemberian insentif	Insentif berdasarkan capaian ESG	Skema insentif berbasis kinerja

Secara konseptual, integrasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Green Investment Competitiveness
= Project Readiness + ESG Compliance + Green Financing
+ Measurable Impact

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan Prioritas VII tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang menggunakan label hijau, tetapi dari kemampuan Aceh menghasilkan investasi yang **layak secara ekonomi, bertanggung jawab secara lingkungan, inklusif secara sosial, dan kredibel secara tata kelola**. Sasaran akhir berupa minimal **20% investasi baru memenuhi standar ESG** perlu ditempatkan sebagai indikator transformasi struktur investasi Aceh menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

3.8 Prioritas VIII: Penguatan Ekonomi Syariah

Karakteristik Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam merupakan modal kelembagaan, sosial, dan kultural yang dapat dikembangkan menjadi diferensiasi strategis dalam menarik investasi halal. Keunggulan tersebut tidak hanya berkaitan dengan identitas daerah, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi ekosistem ekonomi yang mendukung industri halal, pembiayaan syariah, pariwisata ramah Muslim, rantai pasok halal, serta pengembangan produk dan jasa yang memenuhi prinsip syariah.

Pertumbuhan ekonomi halal membuka peluang bagi Aceh untuk membangun posisi sebagai salah satu pusat investasi halal di kawasan Sumatera. Namun, peluang tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, kesiapan kawasan industri, ketersediaan pembiayaan, kepastian sertifikasi, kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antara produsen, lembaga keuangan, pasar, dan investor. Tanpa ekosistem yang kuat, identitas syariah berisiko berhenti sebagai keunggulan normatif dan belum menghasilkan manfaat investasi secara optimal.

Penguatan ekonomi syariah dalam dokumen ini diarahkan pada pembangunan **halal investment ecosystem**, yaitu sistem investasi yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pengembangan kawasan, pembiayaan, produksi, logistik, sertifikasi, promosi, dan pemasaran. Pendekatan tersebut menempatkan Aceh bukan hanya sebagai pasar produk halal, tetapi sebagai lokasi produksi, pengolahan, pembiayaan, dan distribusi industri halal.

Agenda utama meliputi pengembangan **Halal Industrial Park**, pembentukan **Halal Investment Hub**, penguatan pembiayaan syariah, pengembangan pariwisata halal, pembangunan rantai pasok halal, serta pembentukan **Halal Certification Center**. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi industri halal, menarik investor berbasis syariah, memperkuat kapasitas usaha lokal, dan membangun citra Aceh sebagai pusat investasi halal di Sumatera.

A. Matriks Action Plan

Tabel 3.29 Matriks Action Plan Penguatan Ekonomi Syariah

Komponen	Rencana Implementasi
Isu Strategis	Potensi ekonomi syariah Aceh belum dikembangkan sebagai ekosistem investasi yang terintegrasi; kawasan industri halal, pembiayaan syariah, sertifikasi, dan rantai pasok halal masih perlu diperkuat.

Komponen	Rencana Implementasi
Tujuan	Membangun ekosistem ekonomi syariah yang kompetitif, inklusif, terintegrasi, dan mampu menarik investasi industri halal dari dalam maupun luar negeri.
Sasaran	Meningkatnya investasi industri halal, bertambahnya investor syariah, berkembangnya produk dan jasa halal, serta menguatnya posisi Aceh sebagai pusat investasi halal di Sumatera.
Program Prioritas	Penguatan Ekonomi Syariah
Kegiatan Utama	Pengembangan **Halal Industrial Park**. Pembentukan **Halal Investment Hub**. Pengembangan skema **Islamic Finance**. Pengembangan destinasi dan layanan **Halal Tourism**. Pembangunan **Halal Supply Chain**. Pembentukan **Halal Certification Center**. Penyusunan katalog proyek investasi halal. Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dan industri. Promosi investasi halal ke pasar nasional dan internasional.
Leading Sector	DPMPTSP Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Supporting Agency	Bappeda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Pariwisata Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, lembaga sertifikasi halal, perbankan syariah, perguruan tinggi, KADIN, asosiasi usaha, dan pelaku industri.
Lokasi Prioritas	Kawasan Industri Aceh di Aceh Besar, KEK Arun Lhokseumawe, kawasan pariwisata prioritas, sentra agroindustri, serta pusat produksi pangan dan produk halal.
Periode Implementasi	Tahun 2027–2030
Output	Konsep Halal Industrial Park tersedia. Halal Investment Hub beroperasi. Skema pembiayaan syariah dikembangkan. Destinasi pariwisata halal diperkuat. Sistem rantai pasok halal mulai dibangun. Halal Certification Center beroperasi. Proyek investasi halal masuk dalam katalog investasi Aceh.
Outcome	Meningkatnya investasi industri halal, bertambahnya investor syariah, meningkatnya jumlah produk tersertifikasi halal, serta menguatnya daya saing ekonomi syariah Aceh.
Indikator Kinerja Utama	Peningkatan nilai investasi industri halal. Pertambahan jumlah investor syariah. Peningkatan jumlah produk dan usaha tersertifikasi halal. Peningkatan pembiayaan syariah untuk sektor produktif. Peningkatan jumlah proyek halal siap investasi. Meningkatnya posisi Aceh sebagai pusat investasi halal di Sumatera.
Potensi Risiko	Belum terintegrasinya kebijakan ekonomi syariah, rendahnya kesiapan proyek investasi halal, keterbatasan pembiayaan, proses sertifikasi yang

Komponen	Rencana Implementasi
	dianggap kompleks, serta lemahnya keterhubungan antara produsen dan pasar.
Strategi Mitigasi	Penyusunan peta jalan ekonomi syariah, penyederhanaan fasilitasi sertifikasi, pengembangan proyek siap investasi, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, penguatan promosi, serta pembangunan rantai pasok halal secara bertahap.

B. Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah

Tabel 3.30 Pilar Penguatan Ekonomi Syariah Aceh

Pilar	Arah Pengembangan	Contoh Program atau Proyek	Dampak yang Diharapkan
Halal Industrial Park	Penyediaan kawasan industri yang memenuhi standar produksi dan logistik halal	Industri pangan, kosmetik, farmasi, agroindustri, pergudangan halal	Meningkatnya investasi dan kapasitas produksi industri halal
Halal Investment Hub	Pusat informasi, promosi, fasilitasi, dan pendampingan investor halal	Portal proyek halal, layanan investor, *business matching*	Bertambahnya investor dan proyek halal siap transaksi
Islamic Finance	Penguatan pembiayaan usaha dan proyek berbasis prinsip syariah	Pembiayaan bank syariah, sukuk, modal ventura syariah, pembiayaan mikro	Meningkatnya akses pembiayaan produktif
Halal Tourism	Pengembangan destinasi dan layanan wisata ramah Muslim	Hotel, kuliner, wisata budaya, wisata bahari, layanan ibadah	Meningkatnya kunjungan, belanja wisata, dan investasi jasa
Halal Supply Chain	Penjaminan integritas halal dari bahan baku hingga distribusi	Logistik halal, gudang, transportasi, ketertelusuran produk	Meningkatnya kepercayaan pasar dan daya saing produk
Halal Certification Center	Percepatan layanan sertifikasi dan pendampingan usaha	Klinik sertifikasi, laboratorium, pelatihan penyelia halal	Bertambahnya produk dan pelaku usaha tersertifikasi

C. Elaborasi Program Prioritas

1. Pengembangan *Halal Industrial Park*

Pemerintah Aceh perlu mengembangkan **Halal Industrial Park** sebagai kawasan industri yang dirancang untuk menampung kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan ekspor produk halal. Kawasan tersebut perlu didukung oleh utilitas dasar, sistem

jaminan produk halal, laboratorium pengujian, fasilitas logistik, layanan sertifikasi, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi.

Pengembangan kawasan dapat diarahkan pada **Kawasan Industri Aceh di Aceh Besar** dengan mempertimbangkan kedekatannya terhadap Banda Aceh, Bandara Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Malahayati, pasar regional, dan pusat pemerintahan. Sementara itu, **KEK Arun Lhokseumawe** dapat mendukung industri halal berskala besar yang membutuhkan energi, logistik, pelabuhan, dan akses ekspor.

Sektor prioritas dapat mencakup industri pangan dan minuman, kosmetik, farmasi, pengolahan hasil pertanian, pengolahan perikanan, produk kesehatan, serta logistik halal. Pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap, dimulai dari studi kelayakan, penetapan model pengelolaan, penyediaan infrastruktur, pemasaran lahan, hingga fasilitasi investor.

2. Pembentukan *Halal Investment Hub*

Halal Investment Hub berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi investor yang berminat menanamkan modal pada sektor ekonomi syariah. Hub ini menyediakan informasi mengenai peluang investasi, regulasi, kawasan industri, sertifikasi halal, insentif, pembiayaan, mitra lokal, dan potensi pasar.

Fungsi utama Halal Investment Hub meliputi:

- identifikasi dan kurasi proyek investasi halal;
- penyusunan profil dan dokumen IPRO;
- fasilitasi *business matching*;
- pendampingan proses perizinan dan sertifikasi;
- penghubung antara investor, lembaga keuangan, dan pelaku usaha;
- layanan pasca-investasi;
- promosi proyek halal melalui Aceh Investment Portal.

Pembentukan hub akan memperkuat integrasi antara agenda promosi investasi, pengembangan industri, pembiayaan syariah, dan sertifikasi halal.

3. Penguatan *Islamic Finance*

Pengembangan ekonomi syariah memerlukan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek dan prinsip syariah. Pemerintah Aceh perlu memperluas akses pembiayaan melalui bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, modal ventura syariah, pembiayaan rantai pasok, pembiayaan berbasis aset, serta instrumen sukuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan syariah perlu diarahkan pada sektor produktif, termasuk industri halal, agroindustri, pariwisata, energi terbarukan, perikanan, UMKM, dan pengembangan kawasan. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan proyek potensial dengan lembaga pembiayaan serta membantu peningkatan kelayakan usaha.

Untuk proyek berskala besar, perlu dikembangkan dokumen proyek yang memenuhi persyaratan kelayakan teknis, ekonomi, hukum, dan syariah. Sementara itu, bagi UMKM,

dukungan dapat diberikan melalui skema pembiayaan kelompok, penjaminan, pendampingan usaha, dan peningkatan literasi keuangan syariah.

4. Pengembangan *Halal Tourism*

Aceh memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata halal yang tidak hanya bertumpu pada layanan keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, bahari, dan ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata halal diarahkan pada penyediaan layanan yang ramah Muslim, berkualitas, inklusif, dan tetap terbuka bagi seluruh wisatawan.

Program prioritas meliputi peningkatan standar akomodasi, pengembangan kuliner halal, ketersediaan fasilitas ibadah, penyediaan informasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan paket wisata, serta promosi destinasi secara terintegrasi. Investasi pada hotel, restoran, kawasan wisata, transportasi, ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan kegiatan juga perlu difasilitasi.

Keberhasilan pariwisata halal harus diukur dari peningkatan kualitas layanan, lama tinggal wisatawan, belanja wisatawan, investasi jasa pariwisata, dan keterlibatan masyarakat lokal.

5. Pembangunan *Halal Supply Chain*

Kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga oleh integritas bahan baku, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penanganan produk. Oleh karena itu, Aceh perlu membangun **Halal Supply Chain** yang menjamin keterlacakan dan konsistensi standar halal dari hulu hingga hilir.

Pengembangan rantai pasok halal dapat mencakup:

- pemetaan pemasok bahan baku;
- standardisasi proses produksi;
- pemisahan fasilitas penyimpanan;
- pengembangan pergudangan dan logistik halal;
- penggunaan sistem ketertelusuran digital;
- peningkatan kapasitas penyelia halal;
- audit dan pemantauan berkala.

Sistem tersebut penting untuk mendukung industri pangan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan produk ekspor.

6. Pembentukan *Halal Certification Center*

Pemerintah Aceh perlu membentuk **Halal Certification Center** sebagai pusat informasi, pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pusat ini tidak menggantikan kewenangan lembaga sertifikasi, tetapi berfungsi mempercepat kesiapan dokumen, peningkatan kapasitas usaha, penerapan sistem jaminan produk halal, dan koordinasi proses sertifikasi.

Layanan yang dapat dikembangkan meliputi:

- klinik konsultasi sertifikasi;

- pendampingan dokumen;
- pelatihan penyelia halal;
- fasilitasi pengujian laboratorium;
- pendampingan sistem jaminan produk halal;
- layanan bagi UMKM dan industri;
- basis data produk tersertifikasi.

Keberadaan pusat tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan informasi dan biaya transaksi yang dihadapi pelaku usaha.

7. Penyusunan Proyek Investasi Halal Siap Ditawarkan

Setiap sektor ekonomi syariah perlu diterjemahkan menjadi proyek konkret yang layak dipromosikan. Proyek dapat mencakup pembangunan kawasan industri halal, pabrik pengolahan pangan, pusat logistik halal, hotel dan destinasi wisata, pusat kuliner, industri kosmetik, fasilitas pengemasan, hingga platform perdagangan digital halal.

Dokumen proyek perlu memuat lokasi, kebutuhan lahan, nilai investasi, kapasitas produksi, bahan baku, potensi pasar, proyeksi keuntungan, model pembiayaan, persyaratan halal, dan skema kemitraan. Seluruh proyek kemudian dimasukkan ke dalam **Digital Investment Catalogue**, **Aceh Investment Portal**, dan portofolio IPRO.

8. Promosi Investasi Halal

Promosi investasi halal perlu dilakukan secara terarah kepada negara, lembaga pembiayaan, perusahaan, dan investor yang memiliki minat terhadap sektor ekonomi syariah. Promosi tidak hanya berupa pameran, tetapi juga meliputi forum investasi, *business matching*, pertemuan bilateral, kunjungan investor, serta penyampaian proyek secara langsung.

Branding **"Invest in Aceh"** perlu diperkuat dengan subidentitas investasi halal yang menekankan keunggulan Aceh pada aspek regulasi, budaya, produk unggulan, akses pasar, sumber daya alam, serta ekosistem pembiayaan syariah.

D. Critical Success Factors

Keberhasilan penguatan ekonomi syariah ditentukan oleh beberapa faktor utama.

1. **Kebijakan yang terintegrasi**, sehingga program ekonomi syariah tidak berjalan secara sektoral dan terpisah.
2. **Kesiapan kawasan industri halal**, termasuk lahan, utilitas, sistem jaminan halal, logistik, dan pengelolaan kawasan.
3. **Akses terhadap pembiayaan syariah**, baik untuk proyek berskala besar maupun UMKM.
4. **Kemudahan sertifikasi halal**, melalui pendampingan, penyederhanaan proses, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
5. **Ketersediaan proyek investasi yang layak**, didukung studi kelayakan, model bisnis, dan prospek pasar.
6. **Integrasi rantai pasok halal**, dari bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi.

7. **Kompetensi sumber daya manusia**, terutama dalam bidang industri halal, keuangan syariah, pariwisata, sertifikasi, dan promosi investasi.
8. **Branding dan promosi yang konsisten**, agar Aceh memiliki posisi yang jelas di pasar investasi halal.
9. **Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan**, untuk mempercepat transaksi dan realisasi proyek.

F. Quick Wins Tahun Pertama (2027)

Pelaksanaan penguatan ekonomi syariah pada tahun pertama difokuskan pada pembentukan fondasi kebijakan, penyiapan proyek investasi halal, fasilitasi sertifikasi, penguatan pembiayaan, serta pembangunan kelembagaan pendukung.

Tabel 3.31 Quick Wins Penguatan Ekonomi Syariah Tahun 2027

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1	Penyusunan **Peta Jalan Ekonomi dan Investasi Syariah Aceh 2027–2030**	Dokumen selesai dan ditetapkan	Bappeda, DPMPTSP, Disperindag	Peta jalan menjadi acuan program dan penganggaran
2	Studi kelayakan **Halal Industrial Park**	Lokasi, model bisnis, dan tahapan pengembangan tersedia	Disperindag, DPMPTSP, pengelola kawasan	Dokumen studi kelayakan selesai
3	Pembentukan **Halal Investment Hub**	Unit layanan mulai beroperasi	DPMPTSP	Layanan informasi dan fasilitasi investor tersedia
4	Pembentukan **Halal Certification Center**	Pusat pendampingan mulai beroperasi	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Pelayanan konsultasi dan pendampingan tersedia
5	Penyusunan proyek investasi halal siap ditawarkan	Minimal 10 proyek masuk dalam portofolio IPRO	DPMPTSP, OPD Teknis	Dokumen proyek tersedia dalam katalog investasi
6	Fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha	Minimal 250 produk atau usaha difasilitasi	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Permohonan dan penerbitan sertifikasi meningkat
7	Pembentukan forum pembiayaan syariah	Forum pemerintah, bank, dan investor terbentuk	Bappeda, DPMPTSP, lembaga keuangan	Forum menghasilkan daftar proyek prioritas pembiayaan
8	Pengembangan destinasi pariwisata halal percontohan	Minimal dua destinasi dipilih dan ditingkatkan	Dinas Pariwisata	Standar layanan dan paket wisata tersedia
9	Penyusunan model rantai pasok halal percontohan	Minimal dua sektor memiliki model rantai pasok	Disperindag, OPD Teknis	Sistem ketertelusuran dan pemisahan proses mulai diterapkan

No.	Quick Wins	Target Tahun 2027	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
10	Penyelenggaraan Aceh Halal Investment Forum	Satu forum investasi diselenggarakan	DPMPTSP, KADIN	Investor dan lembaga pembiayaan mengikuti forum

F. Expected Early Results

Hasil yang Diharapkan Akhir Tahun 2027

Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menghasilkan fondasi kelembagaan, proyek siap investasi, peningkatan sertifikasi, serta jejaring pembiayaan yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah pada periode berikutnya.

Tabel 3.32 Expected Early Results Penguatan Ekonomi Syariah Tahun 2027

Indikator	Target Akhir Tahun 2027
Peta Jalan Ekonomi dan Investasi Syariah Aceh	1 dokumen ditetapkan
Studi kelayakan Halal Industrial Park	1 dokumen selesai
Halal Investment Hub	Beroperasi
Halal Certification Center	Beroperasi
Proyek investasi halal siap ditawarkan	≥10 proyek
Investor syariah potensial	≥5 investor
Produk atau usaha yang difasilitasi sertifikasi halal	≥250 produk atau usaha
Lembaga pembiayaan syariah yang terlibat	≥5 lembaga
Destinasi pariwisata halal percontohan	≥2 destinasi
Model rantai pasok halal percontohan	≥2 sektor
Forum investasi halal	Minimal 1 kegiatan
Nilai komitmen awal investasi atau pembiayaan syariah	Menunjukkan peningkatan dibanding tahun dasar 2026

G. Roadmap Penguatan Ekonomi Syariah 2027–2030

Tabel 3.33 Tahapan Pengembangan Ekosistem Investasi Halal

Tahun	Fokus Pengembangan	Target Utama
2027	Pembangunan fondasi	Peta jalan ditetapkan, Halal Investment Hub dan Halal Certification Center dibentuk, proyek halal dipetakan
2028	Pengembangan infrastruktur dan transaksi	Halal Industrial Park memasuki tahap pengembangan, pembiayaan syariah bertambah, proyek investasi mulai direalisasikan

Tahun	Fokus Pengembangan	Target Utama
2029	Integrasi ekosistem	Rantai pasok halal berkembang, produk tersertifikasi meningkat, sektor pariwisata dan industri halal terhubung
2030	Penguatan posisi regional	Aceh menjadi salah satu pusat investasi halal di Sumatera dengan ekosistem industri, pembiayaan, sertifikasi, dan promosi yang terintegrasi

I. Kerangka Integrasi Ekosistem Investasi Halal

Penguatan ekonomi syariah perlu dibangun sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan sebagai kumpulan program sektoral yang berdiri sendiri.

Tabel 3.34 Integrasi Ekosistem Investasi Halal Aceh

Tahap Ekosistem	Fungsi Utama	Instrumen Implementasi
Identifikasi potensi	Menentukan sektor dan proyek halal prioritas	Peta potensi dan analisis rantai nilai
Penyiapan proyek	Mengubah potensi menjadi proyek layak investasi	IPRO halal dan studi kelayakan
Promosi	Menjangkau investor dan lembaga pembiayaan	Halal Investment Hub dan forum investasi
Pembiayaan	Menyediakan sumber dana berbasis syariah	Pembiayaan bank, sukuk, modal ventura, dan pembiayaan mikro
Produksi	Menjamin proses produksi sesuai standar	Halal Industrial Park
Sertifikasi	Memastikan kepatuhan dan kepercayaan pasar	Halal Certification Center
Distribusi	Menjaga integritas halal hingga konsumen	Halal Supply Chain
Pemasaran	Memperluas pasar domestik dan internasional	Branding, perdagangan digital, dan promosi ekspor
Layanan pasca-investasi	Menjaga keberlanjutan dan ekspansi usaha	Investor Relation Officer dan *aftercare service*

Secara konseptual, keunggulan ekonomi syariah Aceh dapat dirumuskan sebagai berikut:

Halal Investment Competitiveness
= Islamic Identity + Project Readiness + Sharia Financing + Halal Assurance + Market Connectivity

Keberhasilan Prioritas VIII pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan bertema ekonomi syariah. Ukuran utamanya adalah meningkatnya nilai investasi industri halal, bertambahnya investor dan pembiayaan syariah, meluasnya produk bersertifikasi, terbentuknya rantai pasok halal, serta menguatnya posisi Aceh sebagai **pusat produksi, pembiayaan, dan investasi halal di Sumatera**.

4 Matriks Integrasi Roadmap dan *Action Plan*

Roadmap reformasi iklim investasi berfungsi sebagai peta arah yang menunjukkan tahapan perubahan kebijakan dari tahun 2027 hingga 2030. Namun, roadmap yang hanya memuat urutan waktu belum cukup untuk memastikan implementasi berjalan secara konsisten. Setiap tahapan perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret, target tahunan, penanggung jawab, keluaran, dan hasil yang dapat diukur.

Matriks integrasi roadmap dan *action plan* disusun untuk menghubungkan delapan prioritas reformasi dengan tahapan implementasi tahunan. Melalui matriks ini, setiap agenda tidak lagi dipahami sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian intervensi yang saling berhubungan dan dilaksanakan secara bertahap.

Tahapan implementasi 2027–2030 dirancang dalam empat fase utama:

Tahun	Fase Implementasi	Orientasi Utama
2027	*Foundation and Quick Wins*	Pembentukan fondasi kebijakan, kelembagaan, data, sistem, dan proyek percontohan
2028	*System Development and Expansion*	Pengembangan sistem, pembangunan infrastruktur, perluasan program, dan realisasi proyek awal
2029	*Integration and Acceleration*	Integrasi lintas sektor, percepatan transaksi investasi, dan perluasan skala implementasi
2030	*Consolidation and Competitiveness*	Konsolidasi hasil reformasi, penguatan daya saing, dan pelembagaan sistem investasi

Dengan kerangka tersebut, implementasi reformasi investasi Aceh bergerak dari tahap membangun fondasi menuju pencapaian hasil yang terukur dan berkelanjutan.

A. Matriks Integrasi Roadmap 2027–2030

Tabel 4.1 Matriks Integrasi Prioritas Reformasi dan Tahapan Implementasi

Prioritas Reformasi	2027: Fondasi dan Quick Wins	2028: Pengembangan Sistem	2029: Integrasi dan Percepatan	2030: Konsolidasi dan Daya Saing
1. Penguatan Regulasi Investasi	Membentuk Tim Reformasi Regulasi; melakukan audit regulasi; menyusun *Investment Regulatory Roadmap*; mulai menerapkan RIA; membangun Portal Regulasi Investasi	Merevisi dan menyederhanakan regulasi prioritas; mengharmonisasikan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota; memperluas penerapan RIA	Mengintegrasikan evaluasi regulasi ke dalam siklus perencanaan; menerapkan *regulatory review* berkala; memperkuat konsultasi dunia usaha	Mewujudkan sistem regulasi investasi yang sederhana, transparan, harmonis, adaptif, dan konsisten

Prioritas Reformasi	2027: Fondasi dan Quick Wins	2028: Pengembangan Sistem	2029: Integrasi dan Percepatan	2030: Konsolidasi dan Daya Saing
2. Reformasi Pelayanan Investasi	Membentuk *Investment Help Desk*; menetapkan SLA; melatih petugas pelayanan; mengembangkan sistem pelacakan digital	Mengintegrasikan pelayanan lintas OPD; menerapkan *fast track investment*; memperluas digitalisasi layanan	Mengintegrasikan layanan provinsi dan kabupaten/kota; memperkuat *aftercare services*; menggunakan analitik data pelayanan	Mewujudkan pelayanan investasi terpadu, cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan investor
3. Modernisasi Promosi Investasi	Meluncurkan Aceh Investment Portal; menyusun katalog digital; menyiapkan 50 IPRO; meluncurkan branding "Invest in Aceh"	Melaksanakan roadshow ASEAN dan Timur Tengah; memperluas *business matching*; memperkuat basis data investor	Mengembangkan *investment pipeline* berbasis sektor dan negara sasaran; memperkuat promosi berbasis kinerja	Mewujudkan sistem promosi yang menghasilkan investor baru dan proyek investasi terealisasi
4. Pengembangan Infrastruktur Strategis	Menyusun masterplan; menetapkan KEK Arun Lhokseumawe dan KIA Aceh Besar sebagai fokus; mengidentifikasi kebutuhan utilitas dan akses	Memulai pembangunan jalan, listrik, air baku, internet, pelabuhan, dan kawasan logistik; menyiapkan skema KPBU	Mempercepat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan; mengintegrasikan koridor logistik; memperluas utilitas dasar	Mewujudkan kawasan investasi prioritas dengan konektivitas dan utilitas lengkap serta biaya logistik yang lebih rendah
5. Penguatan SDM Investasi	Membentuk Akademi Investasi Aceh; melatih dan mensertifikasi 200 SDM; membentuk Investor Relation Officer	Memperluas sertifikasi; mengembangkan pelatihan negosiasi, bahasa Inggris, analisis proyek, dan pelayanan digital	Mengintegrasikan kompetensi investasi ke seluruh OPD dan kabupaten/kota; memperkuat *link and match* industri	Mewujudkan 500 SDM tersertifikasi dan sistem pengembangan kompetensi investasi berkelanjutan
6. Percepatan Hilirisasi Industri	Menyusun peta jalan hilirisasi; memetakan lima rantai nilai; menyiapkan 10 proyek hilirisasi; membentuk kemitraan awal	Membangun fasilitas pengolahan, *cold storage*, refinery, industri kopi, nilam, kakao, dan perikanan	Memperluas kapasitas produksi; mengintegrasikan klaster industri dengan kawasan logistik dan pelabuhan;	Mewujudkan klaster hilirisasi yang meningkatkan ekspor produk olahan dan nilai tambah daerah

Prioritas Reformasi	2027: Fondasi dan Quick Wins	2028: Pengembangan Sistem	2029: Integrasi dan Percepatan	2030: Konsolidasi dan Daya Saing
			memperluas pasar ekspor	
7. Pengem-bangan Green Investment	Menyusun ESG Guideline; memetakan 15 proyek hijau; menyiapkan proyek energi terbarukan, karbon, ekonomi sirkular, dan ekonomi biru	Mengembangkan proyek percontohan dan skema pembiayaan hijau; membangun sistem monitoring ESG	Memperluas proyek energi hijau dan pembiayaan; menerapkan standar ESG lintas sektor	Mencapai minimal 20% investasi baru yang memenuhi standar ESG dan memperkuat citra Aceh sebagai destinasi investasi hijau
8. Penguatan Ekonomi Syariah	Menyusun peta jalan; membentuk Halal Investment Hub dan Halal Certification Center; menyiapkan proyek halal	Mengembangkan Halal Industrial Park; memperluas pembiayaan syariah; meningkatkan sertifikasi dan pariwisata halal	Mengintegrasikan rantai pasok halal, promosi, pembiayaan, dan kawasan industri	Memposisikan Aceh sebagai pusat investasi halal di Sumatera

B. Matriks Aktivitas Tahunan Terintegrasi

Tahun 2027

Fase I — *Foundation and Quick Wins*

Fase pertama diarahkan pada pembentukan fondasi kelembagaan, regulasi, sistem, data, dan portofolio proyek. Fokus utama bukan pada pembangunan berskala besar, melainkan pada penyelesaian hambatan dasar dan penciptaan hasil awal yang dapat segera terlihat.

Tabel 4.2 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2027

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2027	Leading Sector
Regulasi	Audit regulasi, pembentukan tim reformasi, penyusunan roadmap regulasi, penerapan awal RIA	Dokumen audit, tim reformasi, roadmap, dan portal regulasi	DPMPTSP, Biro Hukum
Pelayanan	Pembentukan Help Desk, penetapan SLA, pelatihan front office, sistem pelacakan digital	Help Desk aktif, SLA tersedia, petugas terlatih	DPMPTSP

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2027	Leading Sector
Promosi	Peluncuran portal, katalog investasi, 50 IPRO, branding "Invest in Aceh"	Portal dan katalog aktif, 50 IPRO tersedia	DPMPTSP
Infrastruktur	Masterplan, identifikasi kebutuhan KEK Arun dan KIA, studi kelayakan pelabuhan dan utilitas	Masterplan dan daftar proyek prioritas	Bappeda
SDM	Pembentukan Akademi Investasi, sertifikasi 200 SDM, pembentukan IRO	Akademi aktif, SDM tersertifikasi, IRO terbentuk	DPMPTSP, BKPSDM
Hilirisasi	Peta jalan hilirisasi, pemetaan rantai nilai, 10 proyek IPRO hilirisasi	Peta jalan dan proyek siap ditawarkan	Disperindag
Green Investment	ESG Guideline, pemetaan proyek hijau, proyek percontohan	Pedoman ESG dan portofolio proyek	Bappeda, DPMPTSP
Ekonomi Syariah	Peta jalan, Halal Investment Hub, Halal Certification Center	Hub dan pusat sertifikasi beroperasi	DPMPTSP, Disperindag

Target Fase 2027

Fondasi Reformasi = Kebijakan + Kelembagaan + Sistem + Data + Proyek Siap Investasi

Keberhasilan tahun 2027 diukur dari terbentuknya perangkat dasar reformasi, bukan semata-mata dari besarnya realisasi investasi.

Tahun 2028

Fase II — *System Development and Expansion*

Fase kedua diarahkan pada pengembangan sistem, perluasan program, pembangunan infrastruktur, dan realisasi proyek awal. Program yang telah dirancang pada 2027 mulai diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Tabel 4.3. Matriks Agenda Implementasi Tahun 2028

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2028	Leading Sector
Regulasi	Revisi regulasi prioritas, harmonisasi provinsi–kabupaten/kota, perluasan RIA	Regulasi lebih sederhana dan harmonis	DPMPTSP, Biro Hukum
Pelayanan	Integrasi layanan OPD, penerapan *fast track*, pengembangan layanan digital	Pelayanan lintas sektor terintegrasi	DPMPTSP
Promosi	Roadshow ASEAN dan Timur Tengah, *business matching*, penguatan CRM investor	Investor potensial dan LoI meningkat	DPMPTSP

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2028	Leading Sector
Infrastruktur	Pembangunan akses jalan, utilitas, pelabuhan, internet, dan kawasan logistik	Infrastruktur prioritas mulai beroperasi	Bappeda, PUPR
SDM	Perluasan sertifikasi, pelatihan negosiasi dan bahasa Inggris, *link and match*	Kapasitas aparatur meningkat	DPMPTSP, BKPSDM
Hilirisasi	Pembangunan fasilitas pengolahan dan rantai dingin	Industri pengolahan mulai bertambah	Disperindag
Green Investment	Implementasi proyek energi terbarukan, karbon, sirkular, dan pembiayaan hijau	Proyek hijau memasuki tahap transaksi	Bappeda, ESDM
Ekonomi Syariah	Pengembangan Halal Industrial Park, pembiayaan syariah, sertifikasi, dan pariwisata halal	Ekosistem halal mulai terbentuk	Disperindag, DPMPTSP

Tahun 2029

Fase III — *Integration and Acceleration*

Fase ketiga berfokus pada integrasi sistem, percepatan transaksi investasi, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan dampak. Pada fase ini, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu karena setiap prioritas mulai berinteraksi secara langsung.

Tabel 4.4 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2029

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2029	Leading Sector
Regulasi	Evaluasi regulasi berkala dan integrasi kebijakan lintas sektor	Sistem *regulatory review* berjalan	Biro Hukum, DPMPTSP
Pelayanan	Integrasi provinsi dan kabupaten/kota, penguatan *aftercare* dan layanan ekspansi	Pelayanan investasi terpadu lintas wilayah	DPMPTSP
Promosi	Pengelolaan *investment pipeline*, promosi sektoral, pemantauan tindak lanjut investor	Konversi minat menjadi realisasi meningkat	DPMPTSP
Infrastruktur	Integrasi koridor industri, pelabuhan, logistik, energi, air, dan digital	Kawasan prioritas semakin terhubung	Bappeda
SDM	Penyebaran SDM tersertifikasi ke seluruh OPD dan kabupaten/kota	Kompetensi investasi lebih merata	BKPSDM, DPMPTSP
Hilirisasi	Perluasan kapasitas produksi, sertifikasi produk, akses ekspor	Ekspor produk olahan meningkat	Disperindag
Green Investment	Perluasan pembiayaan hijau dan penerapan ESG lintas sektor	Proporsi proyek ESG meningkat	Bappeda, DPMPTSP

Prioritas	Aktivitas Utama	Output Tahun 2029	Leading Sector
Ekonomi Syariah	Integrasi kawasan, pembiayaan, sertifikasi, logistik, dan pemasaran halal	Rantai pasok halal semakin matang	Disperindag

Tahun 2030

Fase IV — *Consolidation and Competitiveness*

Fase terakhir diarahkan pada konsolidasi hasil reformasi, evaluasi kinerja, penguatan kelembagaan, dan peningkatan posisi daya saing Aceh. Pada tahap ini, reformasi harus telah melembaga dalam sistem pemerintahan dan tidak lagi bergantung pada program sementara.

Tabel 4.5 Matriks Agenda Implementasi Tahun 2030

Prioritas	Target Konsolidasi	Outcome Strategis
Regulasi	Regulasi investasi sederhana, konsisten, dan adaptif	Kepastian hukum meningkat
Pelayanan	Layanan cepat, terpadu, digital, dan responsif	Kepuasan investor meningkat
Promosi	Promosi berbasis proyek, pasar, dan hasil	Investor baru dan realisasi proyek bertambah
Infrastruktur	Utilitas dan konektivitas kawasan prioritas terpenuhi	Biaya logistik turun
SDM	500 SDM tersertifikasi dan sistem pelatihan berkelanjutan	Profesionalisme layanan meningkat
Hilirisasi	Klaster pengolahan komoditas unggulan berkembang	Nilai tambah dan ekspor meningkat
Green Investment	Minimal 20% investasi baru memenuhi standar ESG	Daya saing hijau Aceh meningkat
Ekonomi Syariah	Ekosistem investasi halal terintegrasi	Aceh menjadi pusat investasi halal di Sumatera

C. Matriks Keterkaitan Antarprioritas

Reformasi iklim investasi tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Delapan prioritas memiliki hubungan sebab-akibat dan saling memperkuat.

Tabel 4.6 Matriks Keterkaitan Fungsional Antarprioritas

Prioritas Penggerak	Prioritas yang Didukung	Bentuk Keterkaitan
Penguatan Regulasi	Seluruh prioritas	Menyediakan kepastian hukum dan kerangka kebijakan

Prioritas Penggerak	Prioritas yang Didukung	Bentuk Keterkaitan
Reformasi Pelayanan	Promosi, hilirisasi, hijau, syariah	Mempercepat konversi minat menjadi realisasi investasi
Modernisasi Promosi	Hilirisasi, green investment, ekonomi syariah	Membawa proyek prioritas kepada investor sasaran
Infrastruktur Strategis	Hilirisasi, kawasan halal, energi hijau	Menurunkan biaya dan meningkatkan kelayakan proyek
Penguatan SDM	Seluruh prioritas	Menjamin kapasitas implementasi dan layanan
Hilirisasi Industri	Promosi, infrastruktur, SDM	Menciptakan proyek bernilai tambah dan ekspor
Green Investment	Infrastruktur, hilirisasi, ekonomi syariah	Mendorong investasi rendah karbon dan berkelanjutan
Ekonomi Syariah	Hilirisasi, promosi, pembiayaan	Memberikan diferensiasi pasar dan akses investor syariah

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Regulasi + Pelayanan + SDM → Enabling Environment
Promosi + Infrastruktur → Investment Attraction
Hilirisasi + Green Investment + Ekonomi Syariah → Sectoral Investment Growth

Secara keseluruhan:

Reformasi Iklim Investasi
= Enabling Environment + Investment Attraction + Sectoral Transformation

D. Matriks Target Utama 2027–2030

Matriks 4. 7 Target Kinerja Terintegrasi

Indikator Strategis	2027	2028	2029	2030
Regulasi strategis yang diaudit	100%	—	Evaluasi berkala	Sistem permanen
Layanan dengan SLA	100%	Terintegrasi	Lintas wilayah	Konsolidasi
Dokumen IPRO	50 proyek	≥70 proyek	≥90 proyek	≥100 proyek
Investor potensial	≥10	≥20	≥30	≥40
Proyek investasi terealisasi	≥5	≥10	≥15	≥20
Kawasan prioritas memiliki utilitas dasar	≥50%	≥75%	≥90%	100%
SDM tersertifikasi	≥200	≥350	≥450	≥500
Proyek hilirisasi siap investasi	≥10	≥15	≥20	≥25

Indikator Strategis	2027	2028	2029	2030
Produk olahan tersertifikasi	≥25	≥50	≥75	≥100
Proyek hijau teridentifikasi	≥15	≥20	≥25	≥30
Investasi baru memenuhi ESG	≥10%	≥12%	≥15%	≥20%
Proyek investasi halal	≥10	≥15	≥20	≥25
Produk atau usaha halal difasilitasi	≥250	≥500	≥750	≥1.000
Kepuasan investor	≥90%	≥90%	≥92%	≥95%

Catatan: target tahunan perlu diselaraskan kembali dengan kapasitas fiskal, data dasar 2026, rencana pembangunan daerah, dan kemampuan masing-masing perangkat daerah.

E. Mekanisme Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Agar matriks integrasi dapat dilaksanakan, setiap program harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Proses sinkronisasi dilakukan melalui tahapan berikut:

Action Plan → RKPA/RKPD → Renja OPD → KUA-PPAS → APBA → Pelaksanaan Program

Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa kegiatan dalam matriks action plan:

1. masuk dalam dokumen perencanaan tahunan;
2. memiliki nomenklatur program dan kegiatan yang sesuai;
3. memiliki indikator output dan outcome;
4. memiliki alokasi anggaran atau skema pembiayaan;
5. memiliki penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan;
6. dilaporkan melalui sistem monitoring reformasi investasi.

Untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya melalui APBA, Pemerintah Aceh dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif, seperti APBN, KPBU, kerja sama BUMN, investasi swasta, pembiayaan perbankan, pembiayaan syariah, *blended finance*, dan dukungan mitra pembangunan.

F. Prinsip Implementasi Roadmap

Pelaksanaan roadmap 2027–2030 perlu berpedoman pada lima prinsip utama.

1. Bertahap tetapi Konsisten

Setiap agenda dilaksanakan secara bertahap sesuai kapasitas pemerintah daerah, tetapi harus memiliki kesinambungan antartahun.

2. Berbasis Hasil

Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari perubahan kualitas regulasi, pelayanan, realisasi investasi, kapasitas industri, dan kepuasan investor.

3. Terintegrasi Lintas Sektor

Setiap prioritas harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang relevan.

4. Berbasis Kawasan dan Komoditas

Program diarahkan pada kawasan prioritas, khususnya KEK Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh di Aceh Besar, sentra komoditas unggulan, serta koridor logistik.

5. Adaptif terhadap Perubahan

Roadmap perlu dievaluasi secara berkala agar dapat merespons perubahan ekonomi, regulasi nasional, teknologi, pasar global, dan kebutuhan investor.

G. Kesimpulan Integrasi Roadmap dan Action Plan

Matriks integrasi roadmap dan *action plan* memastikan bahwa delapan prioritas reformasi memiliki hubungan yang jelas antara agenda kebijakan, waktu pelaksanaan, aktivitas tahunan, penanggung jawab, output, dan outcome. Dengan pendekatan tersebut, roadmap tidak lagi hanya berfungsi sebagai dokumen penjadwalan, tetapi sebagai instrumen pengendalian implementasi.

Transformasi iklim investasi Aceh 2027–2030 dapat dirumuskan sebagai tahapan berikut:

2027: Build the Foundation
2028: Develop the System
2029: Integrate and Accelerate
2030: Consolidate and Compete

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Aceh menjaga konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, kepastian pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, dan disiplin monitoring. Dengan demikian, seluruh agenda reformasi dapat bergerak secara sistematis dari tahap perencanaan menuju perubahan nyata dalam kualitas iklim investasi, pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

5 Dashboard Monitoring dan Evaluasi

Outline Bagian

Bagian ini disusun dalam delapan komponen utama:

1. Kerangka monitoring dan evaluasi;
2. Tujuan dan fungsi dashboard;
3. Dashboard indikator makro investasi;
4. Dashboard delapan prioritas reformasi;
5. Metadata indikator;
6. Mekanisme pelaporan dan evaluasi;

7. Sistem peringatan dini dan tindak lanjut;
8. Desain *Executive Investment Dashboard*.

A. Kerangka Monitoring dan Evaluasi

Dashboard Monitoring dan Evaluasi disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan reformasi iklim investasi Aceh periode 2027–2030. Dashboard ini menghubungkan program, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak sehingga Pemerintah Aceh dapat menilai apakah setiap intervensi kebijakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target investasi daerah.

Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi keterlambatan, mengukur pencapaian indikator, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak dari setiap agenda reformasi.

Dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif. Instrumen ini harus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, penyelesaian hambatan, pemberian dukungan lintas sektor, dan penyesuaian kebijakan.

Secara konseptual, kerangka monitoring dan evaluasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Input → Activity → Output → Outcome → Impact

dengan penjelasan:

Komponen	Pengertian	Contoh dalam Reformasi Investasi
Input	Sumber daya yang digunakan	Anggaran, SDM, regulasi, sistem informasi
Activity	Kegiatan yang dilaksanakan	Audit regulasi, pelatihan, promosi, pembangunan infrastruktur
Output	Produk langsung dari kegiatan	Dokumen IPRO, portal investasi, proyek siap investasi
Outcome	Perubahan yang dihasilkan	Pelayanan lebih cepat, investor bertambah, industri tumbuh
Impact	Dampak jangka menengah dan panjang	Peningkatan investasi, lapangan kerja, ekspor, dan nilai tambah daerah

Dengan kerangka tersebut, keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata terhadap iklim investasi dan perekonomian Aceh.

B. Tujuan dan Fungsi Dashboard

Dashboard Monitoring dan Evaluasi memiliki lima tujuan utama.

1. Mengukur Pencapaian Target

Dashboard digunakan untuk membandingkan realisasi indikator dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam roadmap 2027–2030.

2. Mengidentifikasi Hambatan Implementasi

Dashboard memberikan informasi mengenai program yang mengalami keterlambatan, kekurangan anggaran, hambatan regulasi, lemahnya koordinasi, atau rendahnya pencapaian output.

3. Mendukung Pengambilan Keputusan

Informasi dashboard menjadi dasar bagi Gubernur, Sekretaris Daerah, Bappeda, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait dalam menentukan tindakan korektif.

4. Memperkuat Akuntabilitas

Setiap indikator memiliki penanggung jawab, sumber data, periode pelaporan, dan target yang jelas sehingga pencapaian dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menjamin Kontribusi Program terhadap Target Investasi

Setiap program harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap indikator makro, seperti realisasi PMA dan PMDN, pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan ekspor, serta penciptaan lapangan kerja.

C. Arsitektur Dashboard Monitoring dan Evaluasi

Dashboard dikembangkan dalam tiga tingkatan.

Tabel 5.1 Arsitektur Dashboard Investasi Aceh

Tingkat Dashboard	Fokus Pemantauan	Pengguna Utama	Frekuensi
Level 1: Executive Dashboard	Indikator makro dan indikator strategis	Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah	Triwulanan dan tahunan
Level 2: Reform Dashboard	Capaian delapan prioritas reformasi	Bappeda, DPMPTSP, kepala OPD	Bulanan dan triwulanan
Level 3: Operational Dashboard	Kegiatan, output, kendala, dan tindak lanjut	Unit teknis dan pelaksana program	Bulanan

Struktur tersebut memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pimpinan daerah menerima informasi strategis, sedangkan perangkat teknis memperoleh data operasional yang lebih rinci.

D. Dashboard Indikator Makro Investasi Aceh

Indikator makro digunakan untuk menilai perubahan menyeluruh pada iklim investasi dan perekonomian daerah. Indikator ini menjadi tolok ukur utama apakah reformasi memberikan hasil nyata.

Tabel 5.2 Matriks Dashboard Indikator Makro Investasi Aceh

No.	Indikator Makro	Definisi Operasional	Satuan	Frekuensi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	**Indeks Iklim Investasi Aceh**	Indeks komposit yang mengukur kualitas regulasi, pelayanan, infrastruktur, SDM, promosi, dan keberlanjutan investasi	Skor 0–100	Tahunan	Survei dan data administratif	Bappeda, DPMPTSP
2	**Realisasi Investasi PMA**	Nilai realisasi penanaman modal asing di Aceh	Rupiah atau USD	Triwulanan	LKPM dan sistem investasi	DPMPTSP
3	**Realisasi Investasi PMDN**	Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri di Aceh	Rupiah	Triwulanan	LKPM dan sistem investasi	DPMPTSP
4	**Pertumbuhan Realisasi Investasi**	Persentase kenaikan realisasi investasi dibanding periode sebelumnya	Persen	Triwulanan dan tahunan	DPMPTSP	DPMPTSP
5	**Jumlah Proyek Investasi Terealisasi**	Jumlah proyek yang telah memasuki tahap konstruksi atau operasional	Proyek	Triwulanan	DPMPTSP, OPD teknis	DPMPTSP
6	**Jumlah Proyek IPRO**	Jumlah proyek investasi siap ditawarkan yang memiliki profil kelayakan	Proyek	Semesteran	Aceh Investment Portal	DPMPTSP
7	**Tingkat Konversi IPRO**	Persentase IPRO yang menghasilkan LoI, MoU, transaksi, atau realisasi	Persen	Semesteran	DPMPTSP	DPMPTSP
8	**Jumlah Investor Baru**	Jumlah investor yang merealisasikan investasi pertama kali di Aceh	Investor	Tahunan	DPMPTSP	DPMPTSP
9	**Penyerapan Tenaga Kerja Investasi**	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh proyek PMA dan PMDN	Orang	Triwulanan	LKPM	DPMPTSP, Disnaker
10	**Kontribusi Investasi terhadap PDRB**	Perbandingan investasi terhadap PDRB Aceh	Persen	Tahunan	BPS, DPMPTSP	Bappeda
11	**Pertumbuhan Industri Pengolahan**	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan	Persen	Tahunan	BPS	Disperindag, Bappeda
12	**Nilai Ekspor Produk Olahan**	Nilai ekspor barang yang telah mengalami proses pengolahan	Rupiah atau USD	Triwulanan	BPS, Bea Cukai, Disperindag	Disperindag
13	**Kepuasan Investor**	Tingkat kepuasan investor terhadap regulasi, pelayanan, infrastruktur, dan fasilitasi	Persen	Tahunan	Survei investor	DPMPTSP
14	**Kepatuhan SLA Pelayanan**	Persentase layanan investasi yang diselesaikan sesuai standar waktu	Persen	Bulanan	Sistem pelayanan	DPMPTSP

No.	Indikator Makro	Definisi Operasional	Satuan	Frekuensi	Sumber Data	Penanggung Jawab
15	**Jumlah Keluhan Investor Terselesaikan**	Persentase pengaduan dan hambatan investor yang diselesaikan	Persen	Bulanan	Help Desk dan IRO	DPMPTSP
16	**Proporsi Investasi Memenuhi ESG**	Persentase investasi baru yang memenuhi kriteria ESG Aceh	Persen	Tahunan	Dashboard ESG	Bappeda, DPMPTSP
17	**Nilai Pembiayaan Hijau**	Nilai pembiayaan yang dialokasikan untuk proyek hijau	Rupiah	Semesteran	Perbankan dan lembaga pembiayaan	Bappeda, OJK daerah, perbankan
18	**Nilai Investasi Industri Halal**	Nilai investasi yang masuk pada sektor industri dan jasa halal	Rupiah	Semesteran	DPMPTSP, Disperindag	DPMPTSP
19	**Jumlah Industri Pengolahan Baru**	Jumlah industri pengolahan yang mulai beroperasi	Unit usaha	Tahunan	Disperindag, DPMPTSP	Disperindag
20	**Indeks Daya Saing Investasi Kawasan**	Indeks yang mengukur kesiapan kawasan industri, utilitas, konektivitas, dan layanan	Skor 0–100	Tahunan	Survei kawasan	Bappeda, pengelola kawasan

Rumus Indikator Utama

1. Pertumbuhan Realisasi Investasi

$$\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

2. Tingkat Konversi IPRO

$$\text{Tingkat Konversi IPRO} = \frac{\text{Jumlah IPRO yang Menghasilkan Komitmen atau Realisasi}}{\text{Total IPRO yang Dipromosikan}} \times 100\%$$

3. Kepatuhan SLA

$$\text{Kepatuhan SLA} = \frac{\text{Jumlah Layanan Selesai Tepat Waktu}}{\text{Total Layanan yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

4. Tingkat Penyelesaian Keluhan Investor

$$\text{Penyelesaian Keluhan} = \frac{\text{Jumlah Keluhan yang Diselesaikan}}{\text{Total Keluhan yang Diterima}} \times 100\%$$

5. Proporsi Investasi ESG

$$\text{Proporsi Investasi ESG} = \frac{\text{Jumlah atau Nilai Investasi yang Memenuhi ESG}}{\text{Total Jumlah atau Nilai Investasi Baru}} \times 100\%$$

E. Dashboard Delapan Prioritas Reformasi

Tabel 5.3 Matriks Indikator Monitoring Prioritas Reformasi

Prioritas	Indikator Utama	Target Akhir 2030	Frekuensi	Penanggung Jawab
1. Penguatan Regulasi Investasi	Persentase regulasi strategis yang telah diaudit	100%	Semesteran	Biro Hukum, DPMPTSP
	Persentase regulasi prioritas yang telah disederhanakan	100%	Tahunan	Biro Hukum
	Persentase rancangan regulasi yang menggunakan RIA	≥80%	Tahunan	Biro Hukum, Bappeda
	Ketersediaan portal regulasi investasi	Beroperasi penuh	Triwulanan	DPMPTSP
2. Reformasi Pelayanan Investasi	Kepatuhan SLA	≥95%	Bulanan	DPMPTSP
	Waktu rata-rata penyelesaian layanan	Menurun setiap tahun	Bulanan	DPMPTSP
	Tingkat penyelesaian pengaduan investor	≥95%	Bulanan	DPMPTSP
	Kepuasan investor	≥95%	Tahunan	DPMPTSP
3. Modernisasi Promosi Investasi	Jumlah proyek IPRO aktif	≥100 proyek	Semesteran	DPMPTSP
	Jumlah investor potensial dalam pipeline	≥40 investor	Triwulanan	DPMPTSP
	Jumlah LoI, MoU, atau komitmen investasi	Meningkat setiap tahun	Triwulanan	DPMPTSP
	Tingkat konversi promosi menjadi realisasi	Meningkat setiap tahun	Tahunan	DPMPTSP
4. Pengembangan Infrastruktur Strategis	Persentase kebutuhan utilitas kawasan yang terpenuhi	100%	Semesteran	Bappeda, PUPR
	Konektivitas kawasan dengan pelabuhan dan bandara	Terintegrasi	Tahunan	Bappeda, Dishub
	Penurunan waktu dan biaya logistik	Menurun setiap tahun	Tahunan	Dishub, Disperindag

Prioritas	Indikator Utama	Target Akhir 2030	Frekuensi	Penanggung Jawab
	Jumlah proyek infrastruktur investasi yang terealisasi	Meningkat setiap tahun	Semesteran	Bappeda
5. Penguatan SDM Investasi	Jumlah SDM tersertifikasi	≥500 orang	Semesteran	DPMPTSP, BKPSDM
	Persentase front office bersertifikat	100%	Tahunan	DPMPTSP
	Jumlah Investor Relation Officer aktif	Tersedia pada unit prioritas	Semesteran	DPMPTSP
	Jumlah kemitraan link and match	≥5 kemitraan	Tahunan	BKPSDM, perguruan tinggi
6. Percepatan Hilirisasi Industri	Jumlah industri pengolahan baru	Meningkat setiap tahun	Tahunan	Disperindag
	Jumlah proyek hilirisasi terealisasi	≥25 proyek kumulatif	Semesteran	Disperindag, DPMPTSP
	Nilai ekspor produk olahan	Meningkat setiap tahun	Triwulanan	Disperindag
	Proporsi komoditas yang diolah di Aceh	Meningkat setiap tahun	Tahunan	OPD teknis
7. Pengembangan Green Investment	Proporsi investasi baru memenuhi ESG	≥20%	Tahunan	Bappeda, DPMPTSP
	Jumlah proyek energi terbarukan	Meningkat setiap tahun	Semesteran	Dinas ESDM
	Nilai pembiayaan hijau	Meningkat setiap tahun	Semesteran	Bappeda, lembaga pembiayaan
	Jumlah proyek karbon, sirkular, dan biru	≥15 proyek kumulatif	Semesteran	OPD teknis
8. Penguatan Ekonomi Syariah	Nilai investasi industri halal	Meningkat setiap tahun	Semesteran	DPMPTSP
	Jumlah investor syariah	Meningkat setiap tahun	Semesteran	DPMPTSP
	Jumlah produk atau usaha tersertifikasi halal	≥1.000 kumulatif	Triwulanan	Disperindag
	Status Aceh sebagai pusat investasi halal Sumatera	Terbentuk dan diakui	Tahunan	Pemerintah Aceh

F. Matriks Target Tahunan 2027–2030

Tabel 5.4 Matriks Target Tahunan Dashboard Strategis

Indikator Strategis	2027	2028	2029	2030
Indeks Iklim Investasi Aceh	Baseline ditetapkan	Naik ≥3 poin	Naik ≥3 poin	Naik ≥4 poin
Pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN	Positif	≥7%	≥8%	≥10%
Proyek IPRO aktif	≥50	≥70	≥90	≥100

Indikator Strategis	2027	2028	2029	2030
Proyek investasi terealisasi	≥5	≥10	≥15	≥20
Kepatuhan SLA	≥90%	≥92%	≥94%	≥95%
Kepuasan investor	≥90%	≥90%	≥92%	≥95%
SDM investasi tersertifikasi	≥200	≥350	≥450	≥500
Proyek hilirisasi terealisasi	≥3	≥8	≥15	≥25 kumulatif
Pertumbuhan ekspor produk olahan	Baseline	Positif	≥5%	≥8%
Proyek hijau teridentifikasi	≥15	≥20	≥25	≥30
Investasi baru memenuhi ESG	≥10%	≥12%	≥15%	≥20%
Proyek energi terbarukan terealisasi	≥1	≥3	≥5	≥8 kumulatif
Nilai pembiayaan hijau	Baseline	Naik	Naik ≥10%	Naik ≥15%
Proyek investasi halal	≥10	≥15	≥20	≥25
Investor syariah potensial	≥5	≥10	≥15	≥20
Produk atau usaha difasilitasi halal	≥250	≥500	≥750	≥1.000

Target tersebut perlu dikaji ulang setiap tahun berdasarkan realisasi, kapasitas fiskal, kondisi pasar, kebijakan nasional, dan perkembangan ekonomi global.

G. Metadata Indikator Kinerja

Setiap indikator harus memiliki metadata yang menjelaskan definisi operasional, rumus perhitungan, satuan pengukuran, sumber data, frekuensi pelaporan, metode verifikasi, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi antarinstansi, menjamin konsistensi pengukuran dari waktu ke waktu, dan memastikan bahwa hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Tabel 5.5 Matriks Format Metadata Indikator

Elemen Metadata	Penjelasan
Nama indikator	Nama resmi indikator yang dipantau
Definisi operasional	Batasan dan pengertian indikator
Tujuan pengukuran	Alasan indikator digunakan
Rumus	Formula atau metode perhitungan
Satuan	Persen, rupiah, orang, proyek, hari, atau skor
Baseline	Nilai awal pada tahun dasar 2026
Target	Nilai yang harus dicapai setiap tahun
Sumber data	Sistem, laporan, survei, atau instansi penyedia
Frekuensi	Bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan
Metode pengumpulan	Administratif, survei, verifikasi lapangan, atau integrasi sistem
Metode verifikasi	Pemeriksaan dokumen, validasi silang, atau audit data

Elemen Metadata	Penjelasan
Tingkat disagregasi	Provinsi, kabupaten/kota, sektor, proyek, PMA, atau PMDN
Penanggung jawab	Perangkat daerah pemilik indikator
Unit pengolah data	Unit yang menghimpun dan mengolah data
Catatan kualitas data	Keterbatasan, revisi, dan potensi duplikasi

Contoh Metadata Indikator

Tabel 5.6 Metadata Kepatuhan SLA Pelayanan Investasi

Elemen	Isi
Nama indikator	Kepatuhan terhadap SLA pelayanan investasi
Definisi	Persentase layanan yang diselesaikan dalam jangka waktu sesuai standar
Tujuan	Mengukur kecepatan dan konsistensi pelayanan
Rumus	Jumlah layanan tepat waktu ÷ total layanan selesai × 100%
Satuan	Persen
Baseline	Ditetapkan berdasarkan data 2026
Target 2030	Minimal 95%
Sumber data	Sistem pelayanan investasi
Frekuensi	Bulanan
Penanggung jawab	DPMPTSP Aceh
Verifikasi	Pemeriksaan *timestamp* dan laporan layanan
Disagregasi	Jenis layanan, sektor, dan kabupaten/kota

Tabel 5.7 Metadata Jumlah Proyek IPRO

Elemen	Isi
Nama indikator	Jumlah proyek IPRO aktif
Definisi	Jumlah proyek yang telah memiliki profil lengkap dan layak dipromosikan
Tujuan	Mengukur kesiapan portofolio investasi
Kriteria	Memiliki lokasi, kebutuhan investasi, pasar, model bisnis, dan status kesiapan
Satuan	Proyek
Baseline	Jumlah IPRO pada akhir 2026
Target 2030	Minimal 100 proyek
Sumber data	Aceh Investment Portal
Frekuensi	Semesteran
Penanggung jawab	DPMPTSP Aceh
Verifikasi	Review kelengkapan dokumen IPRO

Elemen	Isi
Disagregasi	Sektor, lokasi, nilai investasi, dan status transaksi

Tabel 5.8 Metadata Proporsi Investasi Memenuhi ESG

Elemen	Isi
Nama indikator	Proporsi investasi baru yang memenuhi standar ESG
Definisi	Persentase investasi baru yang memenuhi ambang batas penilaian ESG Aceh
Tujuan	Mengukur transformasi investasi menuju keberlanjutan
Rumus	Investasi memenuhi ESG ÷ total investasi baru × 100%
Satuan	Persen
Baseline	Ditetapkan setelah ESG Guideline diberlakukan
Target 2030	Minimal 20%
Sumber data	Dashboard ESG dan laporan investor
Frekuensi	Tahunan
Penanggung jawab	Bappeda dan DPMPTSP
Verifikasi	Penilaian dokumen dan audit sampel
Disagregasi	Sektor, lokasi, nilai, dan jenis investasi

H. Sistem Status Kinerja

Dashboard menggunakan sistem warna untuk menunjukkan tingkat pencapaian indikator.

Tabel 5.9 Klasifikasi Status Kinerja

Status	Warna	Kriteria Capaian	Tindakan
Sangat Baik	Hijau tua	≥100% target	Dipertahankan dan direplikasi
Baik	Hijau	90–99% target	Dilanjutkan dengan perbaikan ringan
Perlu Perhatian	Kuning	75–89% target	Analisis hambatan dan percepatan
Bermasalah	Oranye	50–74% target	Rencana tindakan korektif wajib
Kritis	Merah	<50% target	Eskalasi kepada pimpinan daerah

Nilai capaian dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator yang semakin rendah semakin baik, seperti waktu pelayanan atau biaya logistik, formula disesuaikan:

$$\text{Capaian Indikator Negatif} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

I. Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi

Monitoring dilakukan melalui pelaporan berjenjang dan evaluasi berkala.

Tabel 5.10 Matriks Siklus Monitoring dan Evaluasi

Periode	Kegiatan	Produk	Pemimpin Proses
Bulanan	Pemutakhiran data operasional	Laporan kinerja bulanan	OPD pelaksana
Triwulanan	Review indikator strategis dan kendala	Dashboard triwulanan	DPMPTSP dan Bappeda
Semesteran	Evaluasi capaian prioritas	Laporan evaluasi semester	Tim Reformasi Investasi
Tahunan	Evaluasi outcome dan penyesuaian target	Laporan kinerja tahunan	Pemerintah Aceh
Akhir periode	Evaluasi dampak 2027–2030	Laporan evaluasi akhir	Bappeda dan evaluator independen

1. Monitoring Bulanan

Monitoring bulanan difokuskan pada:

- pelaksanaan kegiatan;
- realisasi anggaran;
- pencapaian output;
- kepatuhan SLA;
- pengaduan investor;
- perkembangan proyek;
- hambatan teknis.

2. Review Triwulanan

Review triwulanan membahas:

- realisasi PMA dan PMDN;
- perkembangan proyek IPRO;
- status investasi prioritas;
- proyek hilirisasi;
- investasi hijau;
- investasi halal;
- tindak lanjut kendala investor.

3. Evaluasi Semesteran

Evaluasi semesteran digunakan untuk:

- membandingkan target dan realisasi;
- menilai efektivitas program;
- menetapkan tindakan korektif;
- menyesuaikan jadwal;
- melakukan realokasi sumber daya.

4. Evaluasi Tahunan

Evaluasi tahunan menjadi dasar:

- penyusunan kebijakan tahun berikutnya;
- penyesuaian target roadmap;
- penyusunan RKPA/RKPD;
- penetapan prioritas anggaran;
- evaluasi kinerja OPD.

J. Mekanisme Pengumpulan dan Validasi Data

Pengumpulan data dilakukan melalui integrasi berbagai sumber, antara lain:

- sistem pelayanan investasi;
- LKPM;
- Aceh Investment Portal;
- sistem pengaduan investor;
- laporan perangkat daerah;
- data BPS;
- data perbankan;
- laporan pengelola kawasan;
- survei investor;
- verifikasi lapangan.

Proses validasi dilakukan melalui empat tahap:

Pengumpulan → Pemeriksaan → Validasi Silang → Pengesahan

Tabel 5.11 Proses Validasi Data

Tahap	Aktivitas
Pengumpulan	Data dihimpun oleh OPD pemilik indikator
Pemeriksaan	Kelengkapan, konsistensi, dan format diperiksa
Validasi silang	Data dibandingkan dengan sumber lain
Klarifikasi	Perbedaan atau anomali dikonfirmasi
Pengesahan	Data disetujui untuk ditampilkan pada dashboard

Tahap	Aktivitas
Publikasi	Data ringkas dipublikasikan sesuai klasifikasi informasi

K. Sistem Peringatan Dini

Dashboard perlu dilengkapi dengan *early warning system* untuk mendeteksi risiko kegagalan program sejak dini.

Tabel 5.12 Matriks Indikator Peringatan Dini

Sinyal Peringatan	Kondisi	Respons Kebijakan
Realisasi investasi turun	Penurunan dua triwulan berturut-turut	Analisis sektor dan percepatan promosi
Kepatuhan SLA rendah	Di bawah 90% selama dua bulan	Audit proses pelayanan
IPRO tidak berkembang	Tidak ada pembaruan selama satu semester	Review kualitas proyek
Investor tidak menindaklanjuti LoI	Tidak ada kemajuan dalam 90 hari	Aktivasi IRO dan aftercare
Proyek hilirisasi tertunda	Deviasi jadwal lebih dari 20%	Intervensi lintas OPD
Pembiayaan hijau stagnan	Tidak ada pertumbuhan satu tahun	Forum pembiayaan dan redesign proyek
Proyek halal tidak terealisasi	Tidak ada transaksi setelah promosi	Review kelayakan dan pasar
Keluhan investor meningkat	Kenaikan lebih dari 20%	Analisis akar masalah dan tindakan korektif

L. Matriks Tindak Lanjut Hasil Monitoring

Tabel 5.13 Matriks Rencana Tindakan Korektif

Kategori Masalah	Contoh Masalah	Tindakan Korektif	Batas Waktu
Regulasi	Tumpang tindih aturan	Harmonisasi dan revisi	Maksimal 90 hari
Pelayanan	SLA tidak tercapai	Penyederhanaan proses	Maksimal 30 hari
Infrastruktur	Utilitas belum tersedia	Percepatan penganggaran dan koordinasi	Maksimal satu semester
SDM	Kompetensi petugas rendah	Pelatihan dan sertifikasi	Maksimal 60 hari
Promosi	Investor potensial tidak aktif	Follow-up dan penyesuaian proyek	Maksimal 30 hari
Hilirisasi	Pasokan bahan baku tidak stabil	Kontrak pasokan dan kemitraan	Maksimal 90 hari

Kategori Masalah	Contoh Masalah	Tindakan Korektif	Batas Waktu
Green Investment	Proyek tidak bankable	Pendampingan studi kelayakan	Maksimal satu semester
Ekonomi Syariah	Sertifikasi lambat	Klinik pendampingan dan simplifikasi	Maksimal 60 hari

M. Desain *Executive Investment Dashboard*

Executive Investment Dashboard dirancang sebagai tampilan ringkas bagi pimpinan daerah. Dashboard menampilkan indikator yang paling strategis dan memerlukan perhatian segera.

Komponen Utama Dashboard

1. Ringkasan Investasi

Menampilkan:

- realisasi PMA;
- realisasi PMDN;
- pertumbuhan investasi;
- jumlah proyek terealisasi;
- penyerapan tenaga kerja.

2. Status Reformasi

Menampilkan status delapan prioritas menggunakan warna hijau, kuning, oranye, dan merah.

3. Pipeline Proyek

Menampilkan:

- jumlah IPRO;
- proyek dalam tahap promosi;
- proyek dalam tahap negosiasi;
- proyek dengan LoI atau MoU;
- proyek dalam konstruksi;
- proyek operasional.

4. Kualitas Pelayanan

Menampilkan:

- kepatuhan SLA;
- waktu rata-rata pelayanan;
- jumlah keluhan;
- tingkat penyelesaian keluhan;
- kepuasan investor.

5. Transformasi Sektoral

Menampilkan:

- proyek hilirisasi;
- industri pengolahan baru;
- ekspor produk olahan;
- proyek energi hijau;
- proyek investasi halal.

6. Peta Sebaran Investasi

Menampilkan sebaran investasi berdasarkan:

- kabupaten/kota;
- sektor;
- nilai investasi;
- status proyek;
- PMA dan PMDN;
- jumlah tenaga kerja.

N. Contoh Tampilan Ringkas Executive Dashboard

Tabel 5.14 Ringkasan Indikator untuk Pimpinan Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Status
Realisasi PMA dan PMDN	Target tahunan	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Proyek IPRO aktif	50–100 proyek	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Kepatuhan SLA	≥95%	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Kepuasan investor	≥95%	Data survei	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Proyek hilirisasi	Target tahunan	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Investasi memenuhi ESG	20% pada 2030	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah
Investasi industri halal	Meningkat	Data berjalan	Tren	Hijau/Kuning/Merah
SDM tersertifikasi	500 orang	Data berjalan	Persentase	Hijau/Kuning/Merah

O. Tata Kelola Dashboard

Agar dashboard berjalan secara berkelanjutan, diperlukan pembagian peran yang jelas.

Tabel 5.15 Matriks Pembagian Peran Pengelolaan Dashboard

Institusi	Peran
Gubernur Aceh	Memberikan arahan dan keputusan strategis
Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan tindak lanjut lintas OPD
Bappeda Aceh	Mengelola kerangka evaluasi dan sinkronisasi perencanaan
DPMPTSP Aceh	Mengelola data investasi, pelayanan, promosi, dan investor

Institusi	Peran
Diskominsa Aceh	Mendukung infrastruktur digital dan integrasi data
Biro Hukum	Mengelola indikator reformasi regulasi
OPD teknis	Menyediakan data sektoral dan perkembangan proyek
Pengelola kawasan	Melaporkan kondisi infrastruktur dan proyek kawasan
BPS	Menyediakan data statistik makro
Perguruan tinggi atau evaluator	Memberikan validasi dan evaluasi independen

P. Prinsip Pengembangan Dashboard

Dashboard harus memenuhi enam prinsip utama.

1. Akurat

Data harus dapat diverifikasi dan bersumber dari sistem yang kredibel.

2. Tepat Waktu

Informasi harus diperbarui sesuai frekuensi yang ditetapkan.

3. Relevan

Indikator harus berkaitan langsung dengan sasaran reformasi investasi.

4. Terintegrasi

Data dari berbagai OPD harus dapat digabungkan dalam satu sistem.

5. Mudah Dipahami

Informasi disajikan dalam bentuk grafik, peta, tren, dan status warna.

6. Berorientasi pada Tindakan

Setiap indikator yang bermasalah harus disertai rencana tindak lanjut.

Q. Kesimpulan Dashboard Monitoring dan Evaluasi

Dashboard Monitoring dan Evaluasi menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa implementasi delapan prioritas reformasi investasi berlangsung secara terarah, terukur, dan akuntabel. Dashboard menghubungkan pelaksanaan program dengan perubahan pada indikator makro, seperti Indeks Iklim Investasi Aceh, realisasi PMA dan PMDN, pertumbuhan proyek IPRO, kepatuhan SLA, perkembangan hilirisasi, investasi hijau, dan ekonomi syariah.

Secara konseptual, fungsi dashboard dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dashboard Investasi = Data + Target + Analisis + Peringatan Dini + Tindak Lanjut

Keberhasilan dashboard tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kualitas data, disiplin pelaporan, kejelasan penanggung jawab, dan konsistensi tindak lanjut. Dashboard harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan bukan sekadar instrumen dokumentasi.

Dengan sistem tersebut, Pemerintah Aceh dapat mengetahui secara cepat program yang berjalan sesuai rencana, program yang memerlukan percepatan, serta kebijakan yang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, Dashboard Monitoring dan Evaluasi akan memastikan bahwa setiap program memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekspor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

6.6 Penutup dan Penguatan Kerangka Implementasi

A. Penegasan Akhir

Action Plan yang dirumuskan dalam bab ini bukan sekadar daftar kegiatan, agenda tahunan, atau kompilasi program perangkat daerah. *Action Plan* merupakan kerangka implementasi kebijakan yang menghubungkan secara langsung hasil asesmen iklim investasi dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan pembangunan di Aceh.

Melalui kerangka tersebut, setiap persoalan yang teridentifikasi dalam asesmen diterjemahkan menjadi tujuan kebijakan, program prioritas, aktivitas konkret, target waktu, indikator kinerja, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, serta hasil yang diharapkan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara diagnosis masalah, intervensi kebijakan, dan perubahan yang ingin dicapai.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hasil Asesmen → Prioritas Kebijakan → Program dan Kegiatan → Output → Outcome → Impact

Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi dalam buku **Kajian Asesmen Iklim Investasi Aceh Tahun 2026** tidak berhenti pada tataran konseptual. Rekomendasi telah diterjemahkan menjadi program yang dapat dilaksanakan, dibiayai, dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Delapan prioritas reformasi yang telah dirumuskan—penguatan regulasi, reformasi pelayanan, modernisasi promosi, pengembangan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, percepatan hilirisasi, pengembangan investasi hijau, dan penguatan ekonomi syariah—harus dipahami sebagai satu kesatuan agenda transformasi. Masing-masing prioritas memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya saling mendukung dalam membentuk iklim investasi yang lebih pasti, efisien, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen, tetapi oleh konsistensi pelaksanaan. Karena itu, *Action Plan* perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RKPA, Renstra perangkat daerah, Renja OPD, KUA-PPAS, APBA, dan sistem monitoring kinerja Pemerintah Aceh.

Integrasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Action Plan → RKPA/RKPD → Renstra dan Renja OPD → Penganggaran → Pelaksanaan → Monitoring dan Evaluasi

Dengan pola tersebut, rekomendasi kebijakan memperoleh jalur implementasi yang jelas dan tidak terpisah dari sistem pembangunan daerah.